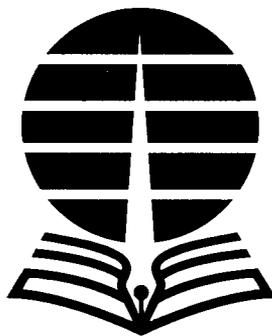


**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN SISWA MISKIN  
SEKOLAH DASAR KECAMATAN KETUNGAU HULU  
KABUPATEN SINTANG**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD IMRAN**

**NIM. 500022766**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2016**

**ABSTRAK****Evaluasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang****MUHAMMAD IMRAN****UNIVERSITAS TERBUKA****Muhammadimran.map.MI@gmail.com**

Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) menimbulkan dampak yang besar terhadap sikap dan perilaku bagi siswa yang menerimanya maupun bagi masyarakat miskin. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan Kepala Sekolah dalam menyalurkan Bantuan Siswa Miskin di SDN 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang, dalam membantu biaya sekolah agar murid yang tidak mampu dapat memperoleh pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Sekolah, Guru-guru, Komite Sekolah, orang tua siswa dan instansi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari analisis yang dilakukan terhadap penelitian menunjukkan bahwa Input, Proses, Output / hasil kebijakan Kepala Sekolah dalam penentuan calon penerima Bantuan Siswa Miskin telah sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, dimulai dengan pendataan calon penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM), pengecekan keakuratan data dengan turun langsung kelapangan serta menentukan Siswa mana yang paling pantas untuk mendapatkan Bantuan Siswa Miskin, mengingat keterbatasan kuota yang diberikan Pemerintah. Calon penerima bantuan siswa miskin yang telah dipilih oleh sekolah berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, efisiensi penentuan calon siswa miskin dari segi waktu, tenaga dan biaya harus dengan segera dilakukan untuk kemudian dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, dan apabila sudah sesuai dengan syarat maka siswa miskin yang diusulkan akan ditetapkan sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin. Efektivitas dan efisiensi penerima Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar. 07 Rasau sebanyak 45 siswa yang sudah memenuhi syarat untuk memperoleh Bantuan Siswa Miskin. Sebagai kesimpulan adalah Kebijakan Kepala Sekolah sudah efektif dan efisien karena dari pendataan dan pengusulan siswa penerima bantuan sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

**Kata Kunci : evaluasi, input, kebijakan, siswa miskin.**

**ABSTRACT****Evaluation of Principal In Disbursement Poor Students in Elementary School  
Rasau Ketungau District of Hulu Sintang****MUHAMMAD IMRAN****OPEN UNIVERSITY**

muhammadimran.map.MI@gmail.com

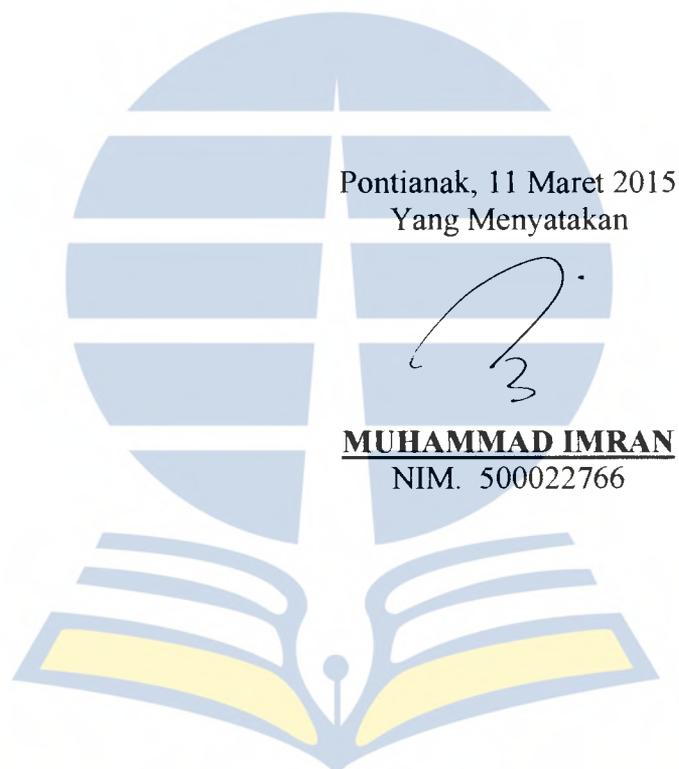
The Policy of Poor Students Assistance (PSA) has a great impact on the attitudes and behavior of students who receive it. This study evaluates the Principal's policy to distribute Help Poor Students at SDN 07 Rasau Ketungau District of Hulu Sintang, in improving the quality of education at State Primary School 07 Rasau. This study used a qualitative method with descriptive research, while the subject of research was the Principal, teachers, school committees, parents and relevant agencies. Data were collected by analyzing the interviews, observation, and documentation. Data analysis used qualitative analysis. From the analysis of the study it showed that the Input, Process, Output / results in the determination of Principal Policies recipients Help Poor Students in accordance with pre-determined criteria. After considering the criteria then the candidate receiving the data collection Poor Student Aid (BSM). According to data from 156 students in 07 elementary schools Rasau were all poor. Principal immediately check the accuracy of the data with a direct down spaciousness and determine which students were most likely to get PSA, given the limitations of the quota provided by the Government. Prospective beneficiaries of poor students who have been selected by the school based on the quota set by the Government. The determination of prospective students poor efficiency in terms of time, effort and expense must be done immediately and to be reported to the Department of Education and Culture Sintang District. When it's in accordance with the terms the poor students proposed to be designated as the recipient Help Poor Students. Effectiveness and efficiency of the receiver PSA in Elementary School. 07 Rasau as many as 45 students who were qualified for the Poor Student Aid. As a conclusion the Principal Policy were effective and efficient as data collection and the nomination of beneficiary students were relevant to plan.

Keywords: Evaluation, Input, Process, Aotput / Results

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM Yang berjudul : “Evaluasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : **MUHAMMAD IMRAN**  
 NIM : **500022766**  
 Program Studi : **Administrasi Publik**  
 Judul TAPM : **Evaluasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07  
 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister  
 (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : **Sabtu, 23 Juli 2016**

Waktu : **08.00 WIB**

Dan telah dinyatakan **LULUS**

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji

Nama: **Suciati, M.Sc., Ph.D**

Penguji Ahli

Nama: **Prof. A. Aziz Sanafiah, M.P.A**

Pembimbing I

Nama: **Dr. Netty Herawati**

Pembimbing II

Nama: **Prof. (emeritus) DR.H Udin S Winata Putra, MA**

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER  
(TAPM)**

Judul TAPM : Evaluasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07  
Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.

Penyusun TAPM : **MUHAMMAD IMRAN.**  
NIM : 500022766  
Program Studi : Administrasi Publik  
Hari / Tanggal :

Pembimbing II



**Prof. (Emiritus) Dr. Udin S. Winataputra, MA**  
NIP. 19451007197302 1 001

Pembimbing I



**Dr. Netty Herawati, M.Si**  
NIP.19651029199002 2 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu / Program Magsiter  
Administrasi Publik



**Dr. Darmanto, M.Ed**  
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana

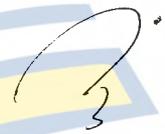


**Suciati, M.Sc. Ph.d.**  
NIP.19520213198503 2 001

**BIODATA**

Nama : **Muhammad Imran**  
N I M : 500022766  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sintang, 30 Januari 1964  
Registrasi Pertama : 2013  
Pendidikan : SD Sintang, Kalimantan Barat  
SMP Sintang, Kalimantan Barat  
SPG Sintang Kalimantan Barat  
S I FKIP UPBJJ UT, Pontianak Kalimantan Barat  
Pekerjaan : Guru  
Masa Kerja : 25 Tahun  
Alamat Tetap : Jalan Pangeran Antasari RT. I RW. 7  
Kelurahan Tanjung Puri Sintang - Kalbar

Pontianak, 11 Maret 2015



**Muhammad Imran**  
NIM. 500022766

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah swt atas rahmat dan Karunianya, penulis dapat menyelesaikan Seluruh Rangkaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) berjudul “Evaluasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang”. Yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Jenjang Magister (S-2) pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Selama menempuh Pendidikan dan Penyelesaian penulisan TAPM ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga TAPM ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tinggi nya kepada yang terhormat.

1. Dr. Netty Herawati, M.Si, selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak meluangkan waktu membantu, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Prof.Dr. Udin S. Winataputra, MA. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan penulis sehingga TAPM ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
4. Kepala UPBJJ – UT Pontianak selaku penyelenggara Program Pasca Sarjana.

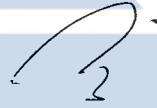
5. Para Dosen Program Pascasarjana, Universitas Terbuka yang dengan tulus telah membina dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis untuk mengembangkan diri dimasyarakat.
6. Seluruh Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan layanan administrasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dengan sikap terbuka dan tulus memberikan informasi dan kesediaan waktu kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan demi menyelesaikan TAPM ini.
8. Kepala Sekolah dan Dewan Guru Sekolah Dasar 07 Rasau yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan informasi berharga kepada penulis.
9. Pegawai Instansi Kecamatan Ketungau Hulu yang telah memberikan informasi yang sangat berarti untuk kelengkapan data sehingga melancarkan kegiatan penelitian dilapangan.
10. Aparat Desa Rasau Kecamatan Ketungau Hulu yang memberikan data yang menunjang dalam penulisan TAPM.
11. Komite Sekolah dan Orang Tua Siswa yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi.
12. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Terbuka satu angkatan yang selalu bersama-sama membagi pengalaman selama perkuliahan serta memberikan motivasi dalam penulisan tesis ini.

13. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan, dan doa untuk dapat menyelesaikan pendidikan.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan TAPM ini.

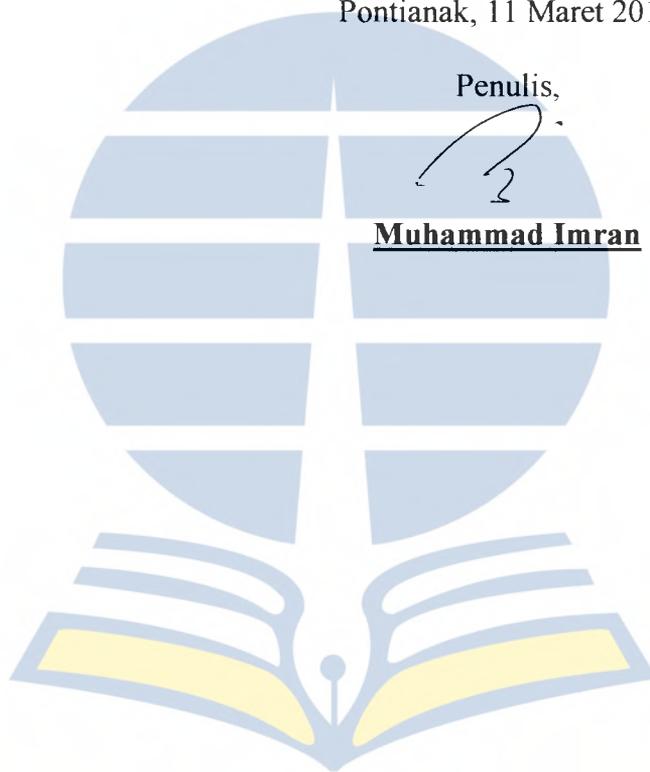
Semoga Allah swt Senantiasa Memberikan Berkah dan Anugrahnya Kepada Kita Semua, Sangat disadari dalam Penulisan TAPM ini terdapat banyak kekurangan saran dan kritik penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan TAPM ini, harapan penulis akhirnya semoga TAPM ini bermanfaat. Amin yaa rabbal Allamin..

Pontianak, 11 Maret 2015

Penulis,



**Muhammad Imran**



## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Abstract .....	ii
Lembar Pernyataan .....	iii
Lembar Layak Uji .....	iv
Lembar Pengesahan .....	v
Lembar Persetujuan .....	vi
Biodata .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Bagan .....	xv
Daftar Tabel .....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11

<b>BAB. II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	13
A.	Kajian Teori	13
1.	Pengertian Kebijakan Publik	13
2.	Implementasi Kebijakan Publik	18
3.	Evaluasi Kebijakan Publik	23
4.	Konsep Pengelolaan Dana BSM	36
B.	Penelitian Terdahulu	44
C.	Kerangka Berfikir	46
D.	Operasionalisasi Konsep	47
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	49
A.	Desain Penelitian	49
B.	Sumber Informasi / Informan	50
C.	Instrumen Penelitian	51
D.	Prosedur Pengumpulan Data	52
E.	Metode Analisis Data	54
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	57
A.	Deskripsi Objek Penelitian	57
B.	Hasil	64
C.	Pembahasan	68
1.	Pencapaian Tujuan Kebijakan Bantuan Siswa Miskin	68
2.	Pelaksanaan Penetapan Penerimaan Bantuan Siswa Miskin	81

3. Hasil Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Siswa Miskin .....	87
4. Dampak Dari Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin ...	103
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>107</b>
A. Simpulan .....	107
B. Saran .....	108

## DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Kerangka Fikir Alur Penelitian .....	47
Bagan 3.1. Model Analisis Interaktif .....	56
Bagan 4.1. Alur Penyaluran Bantuan Siswa Miskin di Kabupaten Sintang ....	92

### DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kondisi Siswa Miskin SDN 07 Rasau Tahun 2012 .....	4
Tabel 1.2. Daftar Penerima Bantuan Siswa Miskin Tahun 2012 .....	7
Tabel 4.1. Mata Pencaharian Penduduk Ketungau Hulu Tahun 2013.....	7
Tabel 4.2. Jumlah Murid Pada Sekolah Dasar Negeri 07 Rasau Tahun 2012 ..	59
Tabel 4.3. Jumlah Guru Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan	

Pada SDN 07 Rasau Tahun 2012 .....	60
Tabel 4.4. Sarana dan Prasarana pada SDN 07 Rasau Tahun 2012 .....	60
Tabel 4.5. Daftar Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) .....	73
Tabel 4.6. Daftar Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2012 / 2013 .....	84
Tabel 4.7. Nilai Rapor Siswa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2012 / 2013 .....	104

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Merujuk dari peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pendidikan nasional diatur secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) baik secara lokal, Nasional maupun Global. Pelaksanaan peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, membuka akses yang lebih luas lagi kepada seluruh warga masyarakat yang selama ini sulit untuk mendapatkan layanan pendidikan dengan layak karna kemiskinan orang tuanya. Upaya pemerintah untuk mengembangkan Negara Indonesia yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa untuk mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya.

Kebijakan pembangunan pendidikan meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yaitu: "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Dari tujuan pendidikan di atas sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan siswa Sekolah Dasar menjadi siswa yang berkualitas dan berpendidikan, sehingga kedepannya dapat tercipta sumber daya manusia yang handal karena sumber daya manusia merupakan unsur penunjang dalam pembangunan untuk mencapai hal tersebut diatas, maka diperlukan adanya bantuan dari pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Bantuan Siswa Miskin yang diberikan berguna untuk meningkatkan prestasi bagi siswa yang mengalami masalah biaya pendidikan, serta mengembangkan bakat yang dimiliki siswa Sekolah Dasar 07 Rasau. Diharapkan bantuan yang diberikan tersebut membuat Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang mampu meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik sehingga siswa-siswanya dapat menempuh pendidikan selanjutnya.

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok keluarga miskin adalah tingginya biaya pendidikan yang memberatkan. Keadaan tersebut tentu perlu mendapat perbaikan sebagai bentuk pemenuhan hak. Setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan.

Bentuk dari kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dalam mengatasi dampak dari krisis ekonomi dan moneter yang menimpa bangsa Indonesia adalah dengan diprogramkannya Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi siswa dari keluarga

kurang mampu, sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008, tentang Pembinaan Kesiswaan. Dengan demikian program penyaluran Bantuan Siswa Miskin dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh para siswa dari keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan sekolah.

Kepala Sekolah sebagai pimpinan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kepala Sekolah mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kondisi siswa-siswinya, yang banyak berasal dari keluarga kurang mampu. Oleh sebab itu Kepala Sekolah berkewajiban membantu para siswa miskin yang mengalami masalah dalam biaya sekolah dan terancam akan putus sekolah ditengah jalan. Kepala Sekolah sebagai pimpinan mengetahui tingkat ekonomi dari para siswanya, karena dari awal pendaftaran sudah diminta untuk mengisi formulir riwayat hidup bagi para siswa, serta penilaian sehari-hari dari para siswa. Banyaknya siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu menjadi pendorong bagi Kepala Sekolah untuk membantu serta mengusulkan agar para siswa miskin mendapatkan bantuan sehingga dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Adapun kelompok sasaran dari program ini adalah anak-anak usia sekolah dengan status dari keluarga kurang mampu sehingga selaras dengan salah satu misi pendidikan nasional adalah : meningkatkan kualitas pendidikan dengan harapan akan terwujudnya kualitas manusia yang seutuhnya. Sebagai unit pelaksana penyaluran Bantuan Siswa Miskin ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan maupun di Desa. Salah satu lokasi di

Kabupaten Sintang yang telah melaksanakan program ini adalah sekolah dasar 07 Rasau di Kecamatan Ketungau Hulu.

Kebijakan pemberian bantuan siswa miskin Sekolah Dasar tidak bisa lepas dari peran Kepala Sekolah dan dewan guru yang paling tidak mengetahui tingkat ekonomi dari anak didiknya. Kepala Sekolah mempunyai kepedulian terhadap kondisi anak didiknya agar para siswa nya dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya. Kepala sekolah mengusulkan siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan siswa miskin kepemerintah Pusat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.

Banyaknya siswa miskin periode 2012/2013 yang sudah melalui seleksi dan berbagai pertimbangan tercantum ditabel dibawah ini.

**Tabel. 1.1. Kondisi Siswa Miskin SDN 07 Rasau Tahun 2012**

No.	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kelas I	11	14	25
2	Kelas II	15	17	32
3	Kelas III	12	16	28
4	Kelas IV	15	21	36
5	Kelas V	17	18	35
	<b>Jumlah</b>	<b>70</b>	<b>86</b>	<b>156</b>

Sumber : Data SDN 07 Rasau Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah siswa miskin di SDN. 07 Rasau sebanyak 156 orang. Apabila siswa-siswa tersebut tidak mendapat bantuan untuk meneruskan sekolah akan menyebabkan siswa yang miskin tersebut berhenti di tengah jalan, sebab tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan untuk

sekolah. Siswa – siswa yang tergolong keluarga miskin akan merasa minder untuk datang kesekolah apabila seragam, atau alat-alat yang diperlukan untuk sekolah tidak dicukupi oleh orang tua siswa karena alasan ekonomi yang kurang mampu. Oleh sebab itu perhatian dari pemerintah untuk menekan angka putus sekolah sangat diperlukan oleh masyarakat yang kurang mampu, supaya siswa-siswi tadi dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Program Pemerintah untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu ditetapkannya Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) berlandaskan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diharapkan dengan adanya penyaluran bantuan dapat membantu siswa miskin untuk menyelesaikan pendidikan dasar.

Kepala Sekolah sebagai pimpinan dilembaga sekolah dengan teliti menentukan siswa yang berhak menerima bantuan siswa miskin, sesuai kriteria yang terdapat didalam buku petunjuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu :

- 1) Siswa miskin yang orang tuanya kurang mampu untuk membiayai pendidikan anaknya atau rumah tangga miskin yang tidak memenuhi kebutuhan hidupnya tidak tercukupi.
- 2) Anak miskin yang berkeinginan untuk bersekolah.
- 3) Anak yatim dan piatu.
- 4) Anak yang terkena bencana alam.
- 5) Anak korban musibah yang berkepanjangan.
- 6) Anak penyandang cacat (disabilitas).

Beberapa kriteria di atas kepala sekolah bisa menentukan siswa yang mana yang berhak menerima bantuan, agar bantuan yang diberikan dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, diharapkan program Bantuan Siswa Miskin yang diberikan Pemerintah dapat meningkatkan kualitas anak bangsa agar mampu bersaing dengan Negara lain. apalagi Sekolah Dasar 07 Rasau ini berbatasan langsung dengan Negara Tetangga Malaysia. Namun pada hakekatnya masih ada anak usia sekolah yang tidak dapat meneruskan sekolahnya, karena faktor ekonomi dari keluarga yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sekolah.

Pemerintah memberikan kuota calon penerima bantuan hanya 10 sampai dengan 50 siswa. Sedangkan Rata-rata siswa di Sekolah Dasar 07 Rasau semuanya dari keluarga kurang mampu atau miskin. Penentuan kuota yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang berdasarkan buku petunjuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat. Dengan alasan keterbatasan Dana Penetapan kuota yang ditentukan agar Bantuan Siswa Miskin (BSM) tidak bertumpuk pada satu sekolah saja, sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu para siswa miskin Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Sintang merasakannya.

Penelitian ini penulis mengambil penyaluran Bantuan Siswa Miskin pada Tahun Ajaran 2012 / 2013 karena pada tahun tersebut Kepala Sekolah melakukan pengambilan dan penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin kepada siswa miskin penerima bantuan. Sedangkan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Kepala Sekolah tidak mengambil dan melakukan penyaluran Bantuan Siswa Miskin dikarenakan berbagai alasan antara lain : Berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang meminta dan mengharuskan setiap calon penerima Bantuan Siswa Miskin harus mempunyai kartu perlindungan sosial (KPS), sedangkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tersebut didapat atas usulan pemerintah desa ke pemerintah Kabupaten sehingga masyarakat Desa Rasau hanya sebagian saja yang mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), sedangkan semua penduduk di Desa Rasau tergolong dari keluarga tidak mampu. Maka kepala sekolah mengambil keputusan tidak mengusulkan siswa miskin penerima bantuan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Berikut ini daftar nama penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) Sekolah Dasar 07 Rasau Periode Tahun 2012/2013 :

**Tabel. 1.2. Daftar Penerima Bantuan Siswa Miskin Tahun 2012/2013**

No.	Nama Orang Tua	Nama Siswa	Jumlah Uang
1	Salmon	Dwika Sulistio	Rp. 450.000
2	Gunda	Siska Nogantika	Rp. 450.000
3	Cucim	Kristi Happy	Rp. 450.000
4	Pelimun	Tri Elyada Putri	Rp. 450.000
5	Patah	Siun	Rp. 450.000
6	Agunius Buyau	Adly Mespas Reza	Rp. 450.000
7	Colombus	Sherlye Frandhea Putri	Rp. 450.000
8	Solaiman	Septimardiani	Rp. 450.000
9	Marius	Mardiana Duli	Rp. 450.000
10	Gerlit	Presti Riani	Rp. 450.000
11	Hikmat	Ereckrisdianto	Rp. 450.000
12	Joni	Gabriel	Rp. 450.000
13	Mustapa	Ayen	Rp. 450.000
14	Apriadi	Zipora	Rp. 450.000
15	Nanang Kusnadi	Franciskus Riki	Rp. 450.000
16	Agus Ezra	Rhemal Ya Rhumerow	Rp. 450.000
17	Sukardi	Keven Septianus	Rp. 450.000
18	Herri Yusak	Ayub Sunadi	Rp. 450.000

19	Jenggi	Elsy Fatma Maryanita	Rp. 450.000
20	Colombus	Melcy Hutcmert	Rp. 450.000
21	Kenan	Nesa Pramita	Rp. 450.000
22	Natus	Yeskel	Rp. 450.000
23	Minardus	Femas Kristanto	Rp. 450.000
24	Mustapa	Reni	Rp. 450.000
25	Nikodemus Minton	Elli Melekh	Rp. 450.000
26	Zefijon	Audrick Hizkia Permana	Rp. 450.000
27	Salmon	Lusi Lestari	Rp. 450.000
28	Haryadi	Ejos	Rp. 450.000
29	Mustapa	Marselina	Rp. 450.000
30	Jubertinus	Berneth Luis Nasario	Rp. 450.000
31	Maryono	Nictro Enjie Trahanord	Rp. 450.000
32	Sempri	Mardiyanus Toli	Rp. 450.000
33	Endi	Sebastian. A	Rp. 450.000
34	Samuel	Elesia Berti Riani	Rp. 450.000
35	Sukardi	Beni Desa Putra	Rp. 450.000
36	Jekius	Feni Nosanti	Rp. 450.000
37	Hamidi	Nadia Decency	Rp. 450.000
38	Patah	Rahel	Rp. 450.000
39	Gunda	Duriyana	Rp. 450.000
40	Adam	Elsinta Dela Rosa	Rp. 450.000
41	Ikman	Ehod Argodi	Rp. 450.000
42	Maryono	Diggit Bitner. E	Rp. 450.000
43	Kalextus	Jenni Paulinus Aquelela	Rp. 450.000
44	Yunus	Lis Dahlia	Rp. 450.000
45	Andi	Nosariana Masselli	Rp. 450.000

Sumber : Data SDN 07 Rasau

Dari tabel di atas dapat dilihat hanya 45 orang yang mendapat Bantuan Siswa Miskin, sedangkan jumlah siswa miskin di Sekolah Dasar Negeri 07 Rasau berjumlah 156 Siswa. Penetapan jumlah siswa yang mendapatkan bantuan berdasarkan petunjuk dari jumlah kuota yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah hanya sedikit menyebabkan sebagian anak tidak mendapat bantuan sehingga berdampak pada

kelancaran proses belajar mengajar. Sehubungan dengan permasalahan terhadap penetapan kuota yang sedikit, Kebijakan Kepala Sekolah sebagai pemimpin mempunyai peranan penting dalam penyaluran bantuan siswa miskin, supaya semua siswa miskin yang ada di Sekolah Dasar 07 Rasau dapat merasakannya.

Selain permasalahan jumlah kuota yang sedikit, kendala yang menjadi penghambat dalam proses penyaluran bantuan siswa miskin yaitu jarak yang sangat jauh dari pusat Kabupaten yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus pelaporan dan pengambilan dana bantuan siswa miskin. Dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses penyaluran bantuan siswa miskin, maka penulis merasa tertarik meneliti permasalahan tersebut, dalam kaitannya dengan Kebijakan kepala sekolah dalam penyaluran bantuan siswa miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu.

#### **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah sangatlah penting dilakukan dalam penelitian agar dapat diketahui arah kemana akan kita teliti. Penelitian ini tentang Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyaluran Bantuan Siswa Miskin, dengan diberikannya bantuan dapat mengurangi angka putus sekolah bagi siswa dari keluarga miskin, oleh sebab itu peranan kepala sekolah sangatlah dominan. Apakah nantinya bantuan itu dapat tersalurkan dengan tepat, mengingat jumlah siswa yang mendapat bantuan tidak sesuai yang diharapkan, ditambah lagi akses lingkungan geografis Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu cukup sulit. Perjalanan dari Desa Rasau ke Kota Kabupaten lumayan jauh sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu diperlukan sosialisasi dan koordinasi dari pihak-pihak yang terkait yang

menangani masalah bantuan siswa miskin seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah, Komite dan Orang Tua dari keluarga miskin. Kebijakan kepala sekolah dalam penyaluran bantuan siswa miskin sangat diharapkan karena kepala sekolah merupakan jembatan atau tempat untuk menentukan tersalur atau tidaknya bantuan itu. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pencapaian tujuan kebijakan penyaluran Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang ?
- 2) Bagaimana pelaksanaan kebijakan melalui pelayanan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang yang transformasikan melalui pelayanan kepada kelompok target?
- 3) Bagaimana Hasil pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang yang sudah dicapai ?
- 4) Bagaimana Dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang yang dirasakan oleh masyarakat ?

**C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan Penelitian ini adalah tentang Kebijakan Kepala Sekolah dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau antara lain :

1. Untuk menganalisis pencapaian tujuan kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.

3. Untuk menganalisis hasil pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang
4. Untuk menganalisis dampak dari Hasil Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi Pemerintah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pihak sekolah maupun kepada masyarakat yang terlibat didalam penelitian ini,serta untuk penulis sendiri diharapkan dapat dimanfaatkan dan mempunyai kegunaan sebagai berikut.

##### **1. Bagi Pemerintah/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.**

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan fikiran dalam pengambilan langkah-langkah yang akan ditempuh,serta dapat mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan efektif atau tidak program Bantuan Siswa Miskin tersebut.

##### **2. Bagi Sekolah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan mutu pendidikan yang kaitannya dengan penyaluran Bantuan Siswa Miskin sehingga para siswa dapat menyelesaikan sekolah Dasar nya.

##### **3. Bagi Siswa dan Orang Tua**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi siswa dan orang tua siswa sehingga memahami dan mengerti mengenai mekanisme

penyaluran Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu.

**4. Bagi Penulis**

Dapat menambah wawasan penulis tentang program Bantuan Siswa Miskin, meningkatkan prestasi akademik penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan akademis, seperti dalam perkuliahan ilmu politik. Namun sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Irfan Islamy sebagaimana dikutip oleh Suandi (2010 : 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya.

Wahab (2008: 40-50), mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut.

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit.
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.

- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. (Wahab, 2008 : 40-50)

Hecllo sebagaimana dikutip oleh Wahab (2008 : 40) mengatakan bahwa "*policy is not... self evident term*" (kebijakan bukanlah sebuah istilah yang jelas dengan sendirinya). Karena itu Hecllo menyarankan dan sekaligus menunjukkan, bahwa kebijakan itu lebih baik dipandang sebagai tindakan yang disengaja dilakukan atau ketidakmauan untuk bertindak secara sengaja daripada dipandang sebagai keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan tertentu.

Richard Rose sebagaimana disunting Winarno (2007 : 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Sementara itu Federick sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008 : 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan

tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Demikian pula Anderson sebagaimana dikutip oleh Islamy (2009 : 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *"a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2007 : 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pada hakikatnya adalah tindakan- tindakan yang dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Dalam konteks itu Eyestone sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *"hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya"*. Banyak pihak

beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Pandangan lain dari Dye sebagaimana dikutip oleh Islamy (2009 : 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” ( apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Lain lagi Easton sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Lebih jauh Anderson sebagaimana disunting Budi Winarno (2008 : 20-21) memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang

dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- 2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;
- 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 5) Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian "tindakan" (nyata/bukan suatu kehendak) yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Sebaik apapun kebijakan publik yang telah dibuat hanya akan menjadi sia-sia jika tidak ada upaya untuk mengimplementasikannya karena tidak akan membawa dampak atau tujuan yang diinginkan. Maka dari itu implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses kebijakan publik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Edwards III yang disunting Haedar Akib (2008:2) bahwa tanpa adanya implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Udoji menyatakan bahwa dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan (Nurhajadmo, 2008:216).

Menurut Samodera Wibawa tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro (Akib, 2008 :2).

Ripley dan Franklin sebagaimana dikutip Winarno (2007:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis luaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Di lain pihak ada pendapat Van Meter dan Van Horn, sebagaimana dikutip Agustino (2008:139) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut diperoleh pemahaman bahwa implementasi adalah proses mewujudkan kebijakan publik dari kebijakan yang bersifat abstrak (tertuang dalam suatu ketentuan atau peraturan perundangan) ke dalam bentuk yang lebih konkrit yaitu berupa tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sehingga memperoleh hasil atau dampak yang diharapkan.

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya bukanlah proses yang sederhana, akan tetapi merupakan proses yang cukup rumit dan sulit. Eugene Bardach seorang ahli studi kebijakan sebagaimana dikutip Agustino (2008:138) menggambarkan kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dengan pendapatnya sebagai berikut :

“...adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengena bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Suharno (2010 : 187) juga mengungkapkan bahwa dalam implementasi kebijakan publik meski telah melalui tahap rekomendasi yang merupakan prosedur yang relatif kompleks, tidak selalu menjamin kebijakan tersebut dapat berhasil dalam penerapannya. Keberhasilan kebijakan publik sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya ; pertimbangan pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Keadaan ini setidaknya memberikan gambaran bahwa terdapat faktor ataupun variabel-variabel tertentu yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik.

Banyak ahli mencoba merumuskan berbagai macam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. George C. Edward III (Suharno, 2010 : 188-190) mengajukan empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

a. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu kelompok sasaran juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.

b. Faktor sumberdaya

Tanpa sumberdaya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c. Faktor Disposisi

Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti ; kejujuran, komitmen, dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana diharapkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan. Dia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah *standard operational procedure (SOP)* sebagai pedoman bagi setiap implementor kebijakan.

Sebagai perbandingan Grindle, sebagaimana dikutip oleh Suharno (2010 : 190-191) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan meliputi beberapa hal, diantaranya: 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. 2) Jenis manfaat yang akan diterima

oleh *target groups*, tentunya sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan *target groups*. 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. 4) Apakah institusi/ implementor sebuah program sudah tepat. 5) apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci. 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya (finansial maupun kompetensi implementor) yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan implementasi kebijakan meliputi tiga aspek yaitu :

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 2) karakteristik institusi rejim yang berkuasa.
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsifitas kelompok sasaran.

Menurut Mazmanian dan Sabastier (Suharno, 2010 : 191-194) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan.

Karakteristik masalah meliputi beberapa faktor sebagai berikut :

- 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
- 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
- 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
- 4) Cakupan perilaku yang diharapkan.

Karakteristik kebijakan mencakup beberapa hal, yaitu :

- 1) Kejelasan isi kebijakan.
- 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
- 3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.
- 4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana.
- 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

- 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Sedangkan variabel lingkungan meliputi beberapa faktor, yaitu : 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, 2) dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, 3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituent group*), dan 4) tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu yang dalam hal ini pelaksanaan kebijakan program Bantaun Siswa Miskin (BSM).

### **3. Evaluasi Kebijakan Publik**

Pengertian Teori Evaluasi dalam Kamus besar Bahasa Indonesia berarti penilaian hasil. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno ( 2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Bryan & White (1987), Evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi. Evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program / rencana.

Pengertian Evaluasi menurut Jones dalam Aprillia (2009) adalah "*evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation*" ( evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembanganya ) pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

Menurut PP No.39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Pendapat lain mengenai Evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008 : 2), bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Sedangkan Uzer (2003 : 120), mengatakan bahwa : Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak di ambil secara acak, maka alternative-alternatif itu harus diberi nilai relative, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.

Menurut Djaali dan Pudji (2008 : 1), Evaluasi dapat juga diartikan sebagai “Proses menilai sesuatu berdasarkan Kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi” Sedangkan ahmad (2007 : 133), mengatakan bahwa “evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentuka nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dll.) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian”.

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000 : 220). Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan” (Yunanda :

2009).

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Menurut Stufflebeam dalam Lababa (2008), evaluasi adalah *“the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives”*. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Masih dalam Lababa (2008), Worthen dan Sanders mendefinisikan “evaluasi sebagai usaha mencari sesuatu yang berharga (*worth*). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu”.

Tague-Sutcliffe (1996 : 1-3), mengartikan evaluasi sebagai *“a systematic process of determining the extent to which instructional objective are achieved by pupils”*. Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.

Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu (meter, kilogram, takaran dan sebagainya), pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung arti, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya.

Penilaian bersifat kualitatif, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Arikunto (2009 : 3) bahwa mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran (bersifat kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut di atas.

Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002 : 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Menurut Crawford (2000 ; 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

Untuk membuat sebuah keputusan yang merupakan tujuan akhir dari proses evaluasi diperlukan data yang akurat. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan teknik dan instrumen yang valid dan reliabel. Secara garis besar evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan teknik nontes (*alternative test*).

Hisyam Zaini, dkk. dalam Qomari (2008 : 8), mengelompokkan tes sebagai berikut:

- a. Menurut bentuknya; secara umum terdapat dua bentuk tes, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif adalah bentuk tes yang diskor secara objektif. Disebut objektif karena kebenaran jawaban tes tidak berdasarkan pada penilaian (*judgement*) dari korektor tes. Tes bentuk ini menyediakan beberapa *option* untuk dipilih peserta tes, yang setiap butir hanya memiliki satu jawaban benar. Tes subjektif adalah tes yang diskor dengan memasukkan penilaian (*judgement*) dari korektor tes. Jenis tes ini antara lain: tes esai, lisan.
- b. Menurut ragamnya; tes esai dapat diklasifikasi menjadi tes esai terbatas (*restricted essay*), dan tes esai bebas (*extended essay*). Butir tes objektif menurut ragamnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: tes benar-salah (*true-false*), tes menjodohkan (*matching*), dan tes pilihan ganda (*multiple choice*). Teknik nontes dalam evaluasi banyak macamnya, beberapa di antaranya adalah: angket (*questionnaire*), wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), skala bertingkat (*rating scale*), sosiometri, paper, portofolio, kehadiran (*presence*), penyajian (*presentation*), partisipasi (*participation*), riwayat hidup dan sebagainya.

Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama (Umar, 2002 : 40), yaitu;

a) *Utility* (manfaat)

Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.

b) *Accuracy* (akurat)

Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.

c) *Feasibility* (layak)

Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

Ada beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi (Umar, 2002 : 41-42), yaitu :

1. *Sistem assessment*

Yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan informasi mengenai posisi terakhir dari suatu elemen program yang tengah diselesaikan.

2. *Program planning*

Yaitu evaluasi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya.

3. *Program implementation*

Yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah

direncanakan.

#### 4. *Program Improvement*

Yaitu evaluasi orang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisipasi masalah- masalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.

#### 5. *Program Certification*

Yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan antara model-model evaluasi, tetapi secara umum model-model tersebut memiliki persamaan yaitu mengumpulkan data atau informasi obyek yang dievaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan.

Evaluasi memiliki tujuan-tujuan alternatif dan tujuan-tujuan tersebut mempengaruhi evaluasi suatu program atau kegiatan. Mengetahui pandangan-pandangan yang beraneka ragam dan mengetahui bahwa tidak semua evaluator setuju pada pendekatan tersebut dalam melakukan evaluasi suatu program/kegiatan adalah penting. Ada beberapa pendekatan umum dalam melakukan evaluasi yaitu :

#### 1. Pendekatan pertama adalah *objective-oriented approach*

Fokus pada pendekatan ini hanya tertuju kepada tujuan program/proyek dan seberapa jauh tujuan itu tercapai. Pendekatan ini membutuhkan kontak intensif dengan pelaksana program/proyek yang bersangkutan.

#### 2. Pendekatan kedua adalah pendekatan *three-dimensional cube* atau

*Hammond's evaluation approach.*

Pendekatan *Hammond* melihat dari tiga dimensi yaitu *instruction* (karakteristik pelaksanaan, isi, topik, metode, fasilitas, dan organisasi program/proyek), *institution* (karakteristik individual peserta, instruktur, administrasi sekolah/kampus/organisasi), dan *behavioral objective* (tujuan program itu sendiri, sesuai dengan taksonomi Bloom, meliputi tujuan kognitif, afektif dan psikomotor).

3. Pendekatan ketiga adalah *management-oriented approach*

Fokus dari pendekatan ini adalah sistem (dengan model *CIPP: context-input- proses-product*). Karena pendekatan ini melihat program/proyek sebagai suatu sistem sehingga jika tujuan program tidak tercapai, bisa dilihat di proses bagian mana yang perlu ditingkatkan.

4. Pendekatan keempat adalah *goal-free evaluation*

Berbeda dengan tiga pendekatan di atas, pendekatan ini tidak berfokus kepada tujuan atau pelaksanaan program/proyek, melainkan berfokus pada efek sampingnya, bukan kepada apakah tujuan yang diinginkan dari pelaksana program/proyek terlaksana atau tidak. Evaluasi ini biasanya dilaksanakan oleh evaluator eksternal.

5. Pendekatan kelima adalah *consumer-oriented approach*

Dalam pendekatan ini yang dinilai adalah kegunaan materi seperti *software*, buku, silabus. Mirip dengan pendekatan kepuasan konsumen di ilmu Pemasaran, pendekatan ini menilai apakah materi yang digunakan sesuai dengan penggunaannya, atau apakah diperlukan dan penting untuk program/proyek yang

dituju. Selain itu, juga dievaluasi apakah materi yang dievaluasi di-*follow-up* dan *cost effective*.

6. Pendekatan keenam adalah *expertise-oriented approach*.

Dalam pendekatan ini, evaluasi dilaksanakan secara formal atau informal, dalam artian jadwal dispesifikasikan atau tidak dispesifikasikan, standar penilaian dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Proses evaluasi bisa dilakukan oleh individu atau kelompok. Pendekatan ini merupakan pendekatan tertua di mana evaluator secara subyektif menilai kegunaan suatu program/proyek, karena itu disebut *subjective professional judgement*.

7. Pendekatan ketujuh adalah *adversary-oriented approach*.

Dalam pendekatan ini, ada dua pihak evaluator yang masing-masing menunjukkan sisi baik dan buruk, disamping ada juri yang menentukan argumen evaluator mana yang diterima. Untuk melakukan pendekatan ini, evaluator harus tidak memihak, meminimalkan bias individu dan mempertahankan pandangan yang seimbang.

8. Pendekatan terakhir adalah *naturalistic & participatory approach*.

Pelaksana evaluasi dengan pendekatan ini bisa para *stakeholder*. Hasil dari evaluasi ini beragam, sangat deskriptif dan induktif. Evaluasi ini menggunakan data beragam dari berbagai sumber dan tidak ada standar rencana evaluasi. Kekurangan dari pendekatan evaluasi ini adalah hasilnya tergantung siapa yang menilai (Salehudin, 2009 : 5-7).

Berbagai pendekatan untuk mengevaluasi suatu program atau proyek diterapkan untuk mendapatkan keefektifan dan keefisienan program atau proyek tersebut baik

secara internal yaitu pihak pengembang atau pengelola, maupun secara eksternal yaitu pengguna. Bentuk-bentuk pendekatan evaluasi yang telah ada harus terus dikembangkan untuk meningkatkan kepuasan pengguna sebagai tujuan utama suatu program dijalankan.

### 1) Type – Type Evaluasi Kebijakan Publik

James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut.

#### a) Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

#### b) Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

#### d) Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis,

di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Program Jamkesta, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Suharto (2012 : 61), tujuan kebijakan publik sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Menurut Suharto (2012: 86), model-model yang umumnya digunakan dalam analisis kebijakan publik adalah:

- a. Model Prospektif adalah bentuk kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut juga model prediktif
- b. Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan. Model ini biasa disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan
- c. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan.

## 2) Fungsi - Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2003:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Soeprapto (2000 : 60): Isu yang kritis dalam evaluasi dampak kebijakan adalah apakah suatu program telah menghasilkan efek yang lebih atau tidak yang terjadi secara alami meskipun tanpa intervensi atau dibandingkan dengan intervensi alternatif. Tujuan pokok penilaian dampak adalah untuk menafsirkan efek-efek yang menguntungkan atau hasil yang menguntungkan dari suatu intervensi. Rossi dan Freeman (dalam Dunn, 2000: 36): Mendefinisikan penilaian atas dampak

adalah untuk memperkirakan apakah intrvensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa evaluasi sistematis kebijakan adalah aktivitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, berapa biaya yang di keluarkan serta keuntungan apa yang didapat, siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan oleh organisasi.

#### 4. Konsep Pengelolaan Dana BSM

Organisasi pelaksana pengelolaan BSM ini terdiri dari organisasi di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat satuan pendidikan (tingkat sekolah) dengan uraian sebagai berikut :

##### A. Tingkat Pusat

###### 1. Struktur

Pelindung : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pengarah : Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penanggungjawab : Direktur Pembinaan SD, Direktur Pembinaan SMP, Direktur Pembinaan SMA, Direktur Pembinaan SMK.

## 2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Tingkat Pusat

- a. Menyediakan anggaran BSM.
- b. Menyusun buku Panduan Pelaksanaan BSM.
- c. Menetapkan alokasi (kuota) penerima BSM tiap kabupaten/kota berdasarkan indeks kemiskinan dan menuangkannya dalam SK Penetapan Alokasi BSM berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- d. Menginformasikan proses penyaluran dana BSM kepada Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui surat pemberitahuan.

## B. Tingkat Provinsi

### 1. Struktur

Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Penanggung jawab : Kasubdin/Kabid yang menangani pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi

### 2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Provinsi

- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam rangka pendataan calon penerima BSM;
- b. Mendampingi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi dan validasi data calon penerima BSM

dengan masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

- c. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

### C. Tingkat Kabupaten/Kota

#### 1. Struktur

- Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Penanggung Jawab : Kasubdin/Kabid yang menangani pembinaan SD,SMP, SMA, dan SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Pelaksana : Kepala Seksi yang menangani SD, SMP, SMA, dan SMK atau penanggungjawab BSM pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

#### 2. Tugas dan tanggungjawab Dinas Pendidikan kabupaten/Kota

- a. Berkoordinasi dengan satuan pendidikan untuk melakukan pendataan calon penerima BSM dari setiap Satuan Pendidikan pendidikan baik negeri maupun swasta di wilayah masing-masing;
- b. Menetapkan usulan alokasi penerima BSM untuk setiap sekolah berdasarkan alokasi (kuota) BSM kabupaten/Kota dari masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menuangkannya dalam SK Penetapan Alokasi Calon Penerima Dana BSM;
- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam mengajukan usulan jumlah siswa miskin sebagai calon penerima

BSM kepada masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- d. Merekap laporan realisasi penerimaan dana BSM dari sekolah dan mengirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi;
- e. Melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur;
- f. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan sekolah penerima BSM;
- g. Melakukan koordinasi dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana BSM;
- h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi ke sekolah;
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

#### **D. Tingkat Kabupaten/Kota**

##### **1. Struktur**

Penanggung Jawab : Kepala Sekolah

Pelaksana : Guru dan Tata Usaha Sekolah

##### **2. Tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan**

- a. Mendata siswa calon penerima BSM sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- b. Membuat daftar usulan calon penerima BSM per kelas dengan gendernya sesuai dengan urutan prioritas (urutan ke-1 berarti lebih membutuhkan dibanding dengan urutan berikutnya).

- c. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah tentang usulan calon siswa penerima BSM;
- d. Membatalkan penerima BSM yang tidak sesuai dengan kriteria;
- e. Menyampaikan laporan realisasi penerimaan dana BSM ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap kehadiran siswa penerima BSM ke sekolah.

#### **E. Lembaga Penyalur**

##### **1. Struktur**

Penanggung Jawab : Kepala Sekolah

Pelaksana : Guru dan Tata Usaha Sekolah

##### **2. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Penyalur**

###### **a. Asbanda**

- 1) Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap anggota Asbanda dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan program penyaluran dana BSM.
- 2) Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap anggota Asbanda dalam rangka penyaluran dana BSM.
- 3) Mengkoordinasikan pelaporan dana BSM secara berkala yang tersalurkan kepada Lembaga Penyalur.

b. Bank Pembangunan Daerah

- 1) Menerbitkan rekening atas nama siswa penerima BSM sesuai dengan data yang diperoleh dari Direktorat Teknis;
- 2) Menyalurkan dana dengan cara pemindah bukuan ke rekening atas nama siswa penerima;
- 3) Menyalurkan dana BSM sampai ke rekening siswa;
- 4) Menginformasikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan dari direktorat teknis tentang penerbitan SP2D bahwa dana BSM dapat diambil oleh siswa;
- 5) Menyampaikan laporan kemajuan penyaluran secara berkala (mingguan) atau sewaktu-waktu diminta sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 6) Menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban penyaluran dana dan sisa dana tidak tersalur ke masing-masing Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu. Sebagai implementasi dari UU tersebut pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi bahwa pendanaan

pendidikan mejadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dikomandani oleh Depertamen Pendidikan dan Departemen Agama yang penyalurannya, penggunaan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan secara terpadu oleh pihak terkait dari menteri hingga kepala sekolah/madrasah pada sekolah-sekolah yang menerima BSM. Pemberian bantuan BSM bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi penduduk miskin untuk dapat memenuhi biaya kebutuhan di bidang pendidikan agar siswa yang orang tuanya tidak mampu atau miskin tetap memperoleh pendidikan.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, (2010:8) bantuan BSM adalah program kebijakan pemerintah yang menyediakan pendanaan biaya kepada personal di satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, program kebijakan BSM adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya operasional bagi personal di satuan pendidikan dasar.

Secara umum tujuan pemberian BSM adalah mengamankan program pemerintah dalam menuntaskan wajib belajr dua belas tahun (Pendidikan Menengah Universal), secara khusus program BSM ini bertujuan untuk :

1. Menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin untuk emperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak

2. Mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk bersekolah
3. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran
4. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bahkan hingga tingkat menengah atas.

Penerima BSM adalah siswa miskin yang pada tahun pelajaran 2013/2014 masih berstatus sebagai siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta memenuhi sekurang-kurangnya satu dari kriteria berikut.

1. Siswa yang orang tuanya menerima Kartu Perlindungan Sosial
2. Siswa penerima Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin
3. Orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PHK
4. Yatim dan/atau piatu
5. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, atau indikator lokal lainnya).

Dana program BSM digunakan untuk keperluan pendukung biaya pendidikan siswa, meliputi:

1. Pembelian buku dan alat tulis
2. Pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah
3. Pembiayaan transportasi ke madrasah
4. Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran di madrasah.

Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami

orangtuanya. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marginal.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berkenaan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah pernah dilakukan oleh Ninik Purwaning Setyorini (2010) dengan judul Implementasi Program BOS 2009 di Sekolah Negeri pada Komisariat SMPN 1 Bojonggede Kabupaten Bogor. Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan Ninik Purwaning Setyorini (2010), pengelolaan BOS disekolah berjalan lancar namun banyak ketentuan - ketentuan administrative yang tidak dilaksanakan, Motivasi sekolah untuk membaca dan mempedomani panduan pelaksanaan secara mandiri masih kurang maksimal. Sekolah sangat bergantung pada model sosialisasi secara langsung misalnya dalam bentuk workshop, Beberapa ketentuan dalam panduan dapat dikatakan kurang sesuai dengan kondisi lapangan sehingga tingkat keterlaksanaannya relative rendah, misalnya ketentuan adanya unsur orang tua siswa dalam tim BOS sekolah serta penggunaan format - format dalam administrasi pengelolaan dana BOS. Sekolah cenderung memilih cara pengelolaan yang simple dan terlaksana menurut persepsi masing - masing yang penting dana dapat dipertanggung jawabkan. pada dasarnya sekolah memerlukan sumber dana yang dapat dikelola secara otonomi sesuai dengan kebutuhan masing - masing rambu - rambu penggunaan dana BOS dirasa cukup menyulitkan karena sekolah tidak mempunyai sumber dana lain yang

lebih fleksibel penggunaannya. Ketentuan administrative yang harus dikerjakan sekolah tidak sebanding dengan jumlah pengelola di sekolah.dll.

Perbedaan dengan kajian peneli tian ini, Ninik Purwaning Setyorini (2010) tentang Implementasi Program BOS di Sekolah Negeri pada Komisariat SMPN1 Bojonggede, Kabupaten Bogor. Maka penulis meneliti tentang Evaluasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.

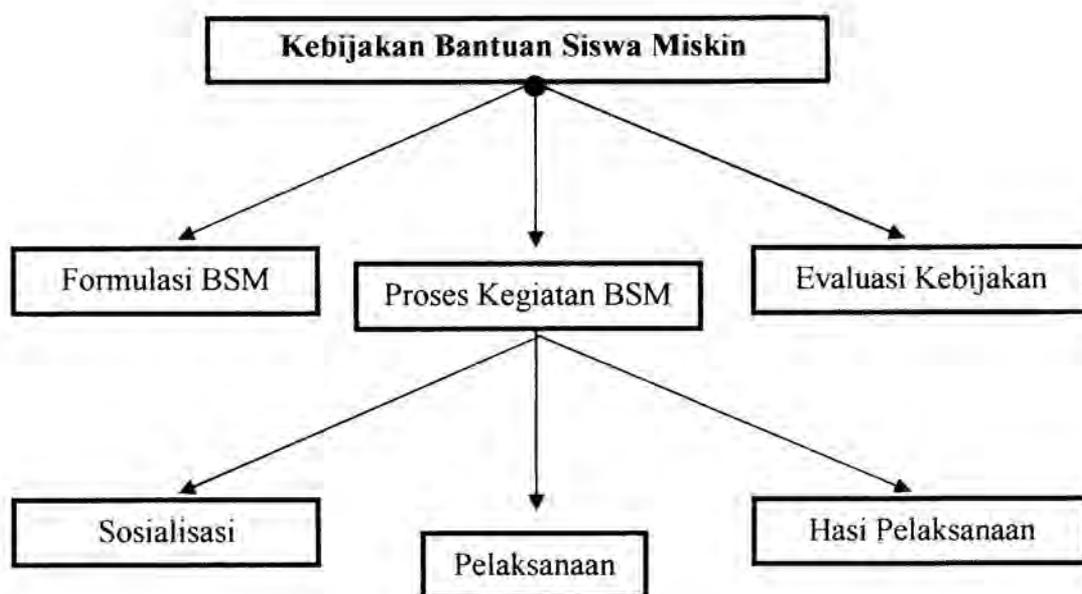
Selanjutnya, Penelitian serupa pernah dilakukan juga oleh Aulia Kamal Altatur (2013) dengan judul Diskresi Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD). ( Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Sebanen II Kalisat Kabupaten Jember ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar dengan menggunakan diskresi pelaksanaan program. Kemiskinan merupakan masalah bangsa yang menjadi perhatian pemerintah Kebijakan Pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan adalah dengan mengeluarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Implementasi kebijakan tersebut terwujudkan dalam program-program pemerintah, salah satunya berkaitan dengan konteks kemiskinan dan pendidikan. Program BSM-SD merupakan program pemerintah untuk mengurangi angka putus sekolah serta mengurangi beban wali murid. Dalam pelaksanaannya terdapat keputusan sekolah untuk membagikan dalam bentuk peralatan. Tindakan ini berseberangan dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman pelaksanaan program tersebut.

Perbedaan dengan kajian penelitian ini, Altatur (2013) mengkaji masalah Diskresi Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD), sedangkan penelitian ini diarahkan pada kebijakan kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.

### **C. Kerangka Berfikir**

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti yang ingin mengkaji masalah Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar yang diberikan kepada siswa yang taraf ekonominya kurang mampu, pihak sekolah sebagai lembaga penyalur tingkat Sekolah Dasar mempunyai peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan, agar anak yang kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya.

Peneliti melihat banyak siswa di Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang taraf ekonominya kurang mampu karena mata pencaharian dari masyarakat Desa Rasau sebagian besar petani, untuk memenuhi kebutuhan Hidup dan sekolah anaknya tergolong tidak mampu. Akibat dari itu semua bisa mengakibatkan siswa yang bersekolah putus ditengah jalan. Program pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar Sembilan tahun harus didukung dengan upaya untuk membantu anak-anak yang kurang mampu, yang berkeinginan untuk melanjutkan sekolah, maka dari itu pemerintah memberikan bantuan siswa miskin bagi anak-anak yang kurang mampu.



**Bagan 2.1. Kerangka Pikir Alur Penelitian**

#### **D. Operasionalisasi Konsep**

Operasional konsep merupakan suatu langkah penelitian, dimana peneliti menurunkan variabel penelitian kedalam konsep yang memuat indikator indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Fungsi operasionalisasi konsep ini adalah mempermudah peneliti dalam melakukan pengukuran. Ukuran baik tidaknya kerangka operasional sangat ditentukan oleh seberapa tepat dimensi dimensi yang diurai memberikan gambaran tentang variabel, hal ini merujuk kepada bagaimana peneliti mengklasifikasikan suatu kasus dalam suatu kategori tertentu. Terdapat dua asas penting yang harus diperhatikan peneliti dalam melakukan operasionalisasi konsep. Pertama, asas *exclusiveness*, yaitu satu kasus tidak boleh masuk dalam dua

kategori. Kedua, asas exhaustiveness, yang menyatakan semua kasus yang diukur atau observasi harus bisa dimasukkan dalam salah satu kategori. ( Purwanto dan Sulistyawati, 2007 : 55 ). Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini meliputi :

1. Landasan hukum Bantuan Siswa Miskin berdasarkan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan.
2. Kepala Sekolah yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang menjadi pimpinan disuatu sekolah.
3. Pemimpin adalah pemegang kendali organisasi, jika kinerjanya baik memimpin maka baik pula organisasinya, Sebaliknya buruk kinerja memimpinyan tercermin buruk pula organisasinya. Untuk itu bagaimana pemimpin memainkan perannya untuk mengkoordinasikan bawahannya agar kegiatan organisasi berjalan terarah, Masing - masing unit menjadi kompak.
4. Bantuan Siswa Miskin adalah suatu program yang dicanangkan dapat berhasil dan tepat pada tujuan yang diinginkan. Kebijakan dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dapat mencapai hasil yang diharapkan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memperoleh suatu fakta atau kenyataan dalam kehidupan. Penelitian yang dilakukan pasti mempunyai suatu tujuan untuk mencapai suatu hasil, tujuan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menemukan, membuktikan dan mengembangkan pengetahuan tertentu. Sehingga dapat untuk dipahami, untuk mengantisipasi dan memecahkan suatu masalah. Dengan tujuan yang jelas dan dirumuskan dengan baik, diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif, adalah membuat deskripsi yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Effendi dan Singarimbun ( 1995 : 4 ) menyatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana penelitian mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Sedangkan menurut Nawawi ( 2005 : 17 ), bahwa metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek / objek penelitian ( seseorang, lembaga, masyarakat dan lain - lain ). pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta - fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Moleong (2001) mengatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan :

- 1) Metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
- 2) Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden.
- 3) Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola - pola nilai yang dihadapi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapatlah diketahui bahwa penelitian merupakan usaha mengumpulkan, mencari dan menganalisis fakta dan cara yang diteliti, tersaji dengan lengkap dan luas mengenai suatu permasalahan dan dapat dirumuskan pemecahannya. Untuk mencari pemecahan masalah perlu pencarian data yang akurat dan relevan terhadap masalah yang diteliti, sehingga perlu dilakukan pendekatan terhadap objek yang akan diteliti dan menetapkan suatu rancangan penelitian yang akan digunakan.

Dalam penelitian deskriptif ini, penulis ingin mendeskripsikan tentang kebijakan kepala sekolah serta factor - faktor yang menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan siswa miskin ditingkat sekolah dasar di Desa Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.

#### **B. Sumber Informasi / Informan**

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penyaluran bantuan siswa miskin, maka diperlukan informasi yang menjadi subjek penelitian. Adapun informasi yang menjadi subjek penelitian ini terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
2. Kepala Sekolah
3. Guru-guru
4. Aparat Desa
5. Komite Sekolah
6. Orang Tua Siswa
7. Siswa

### **C. Instrumen Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, Banyak warga yang taraf kehidupannya kurang mampu dan anak-anak yang bersekolah banyak memerlukan bantuan agar dapat meneruskan sekolah dan mengejar cita-citanya. Lagi pula keinginan siswa - siswa untuk terus bersekolah cukup tinggi. Oleh sebab itu penulis ingin dengan adanya penelitian ini, bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat menekan angka putus sekolah, serta bisa mengimbangi perkembangan murid Sekolah Dasar yang ada di Negara Tetangga. Instrumen Penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan mengolah, menganalisa dan menyajikan Data – data secara sistimatis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu Hipotesis. Jadi semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut

instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner : Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal yang ia ketahui.
2. Wawancara ( interview ) : interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid , orang tua, pendidikan, perhatian , sikap terhadap sesuatu.
3. Observasi : mengadakan pengamatan secara langsung, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar dan rekaman suara. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan di amati.
4. Dokumentasi : peneliti menyelidiki Benda-benda tertulis seperti buku-buku majalah, dokumen, Peraturan-peraturan, sikap terhadap sesuatu.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh segala data dan informasi serta keterangan - keterangan bagi kepentingan dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut

##### **1. Kuesioner**

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal yang ia ketahui.

## 2. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan dialog dan tatap muka, peneliti menjangkit data dan informasi dari informan secara mendalam. Menurut Sutrisno Hadi, wawancara merupakan proses Tanya jawab secara langsung. Dalam melakukan wawancara digunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan kepada kepentingan masalah yang diteliti.

## 3. Observasi

Adalah pengamatan langsung yang dilakukan peneliti dalam rangka memperoleh data dan informasi yang belum terjaring melalui wawancara, kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat, mengenai hal - hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan. Yang terjadi dilapangan, khususnya keefektifan pemberian bantuan terhadap siswa miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.

## 4. Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap mendukung dan relevan dengan masalah yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah, dokumen peraturan pemerintah dan Undang - Undang yang telah disediakan oleh lembaga yang terkait untuk dipelajari dikaji dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

## E. Metode Analisis Data

Metode Analisis data dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan agar menjadi sistematis. Metode yang digunakan dalam rangka menganalisis data dalam penelitian ini adalah :

- a. Pedoman wawancara yaitu berisi daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, untuk mendapatkan data atau keterangan dari subjek penelitian.
- b. Pedoman observasi yaitu pedoman untuk memudahkan peneliti mengadakan pengamatan dilapangan, panduan observasi berisi daftar yang berisi jadwal kegiatan, agenda kegiatan.
- c. Pedoman Dokumentasi

Untuk mendapatkan dokumen diperlukan peralatan yang berhubungan dengan kegiatan penelitian seperti alat tulis, kertas, kamera dan tape recorder.

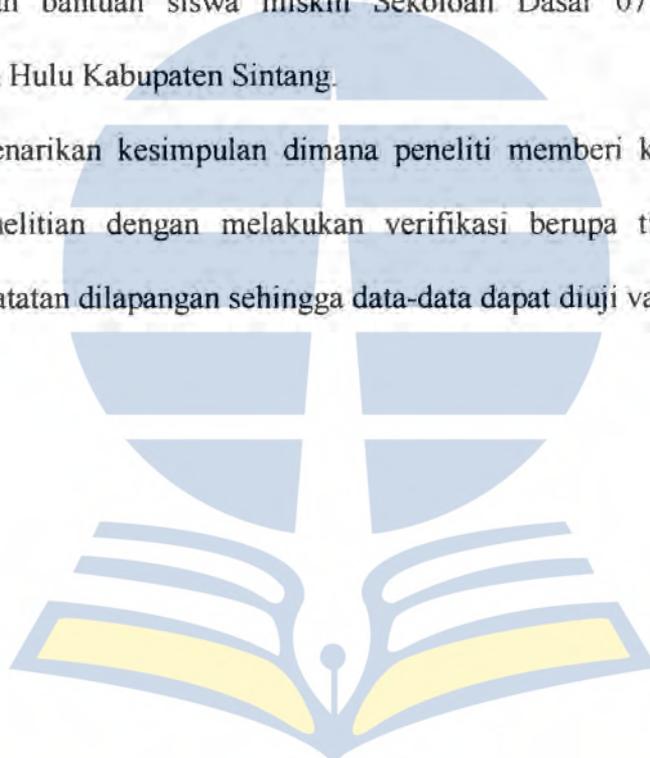
Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, yang kemudian dibantu dengan data – data yang diperoleh dilapangan, analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan berdasarkan fakta dan dilengkapi dengan data, menganalisa data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

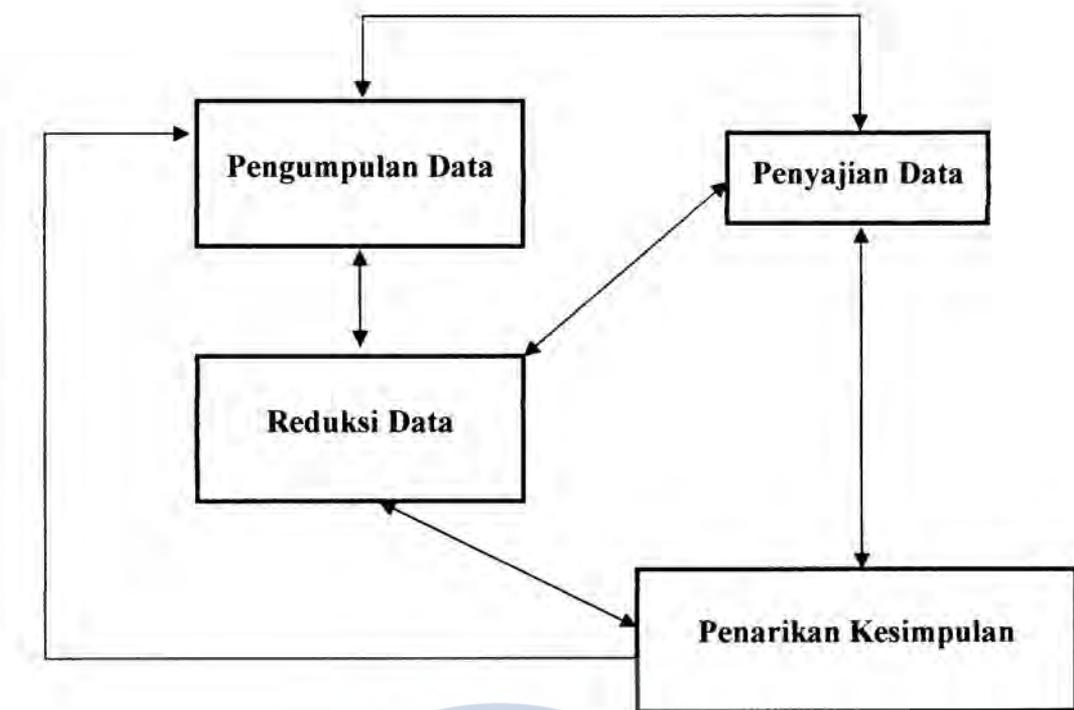
Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis kebijakan kepala sekolah dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan, yaitu pengumpulan informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian mengenai sasaran yang berhak menerima bantuan dan faktor-

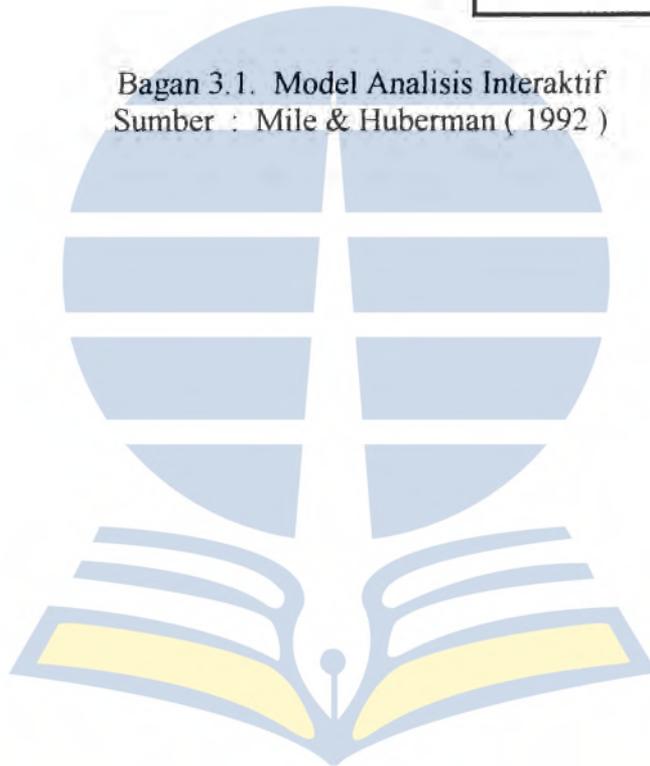
faktor yang mempengaruhi penyaluran dana bantuan, serta kepemimpinan kepala sekolah.

2. Tahap Reduksi Data, pada tahapan ini dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyempurnaan serta penyederhanaan informasi atau data yang kasar yang ada dari catatan - catatan pengamatan yang dilakukan dilapangan selama penelitian, sehingga data yang didapat berguna bagi penelitian.
3. Tahap Penyajian Data, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penafsiran terhadap data-data yang telah diseleksi dapat diuraikan atau disajikan dalam bentuk argumentasi tentang kebijakan kepala sekolah dalam penyaluran bantuan siswa miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.
4. Tahap Penarikan kesimpulan dimana peneliti memberi keputusan akhir dari hasil penelitian dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan dilapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.





Bagan 3.1. Model Analisis Interaktif  
Sumber : Mile & Huberman ( 1992 )



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Ketungau Hulu terletak sekitar 139 Km dari pusat kota Kabupaten Sintang. Dengan jarak tempuh sekitar empat sampai dengan lima jam, ini dikarenakan jalan akses menuju Kecamatan Ketungau Hulu masih berupa tanah merah dalam keadaan rusak dan berlubang.

Dengan keadaan daerah yang jauh dari pusat kota dan minimnya lapangan pekerjaan di Kecamatan Ketungau Hulu khususnya di Desa Rasau Jaya membuat kebanyakan masyarakatnya lebih memilih untuk bertani. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Rasau Jaya Kecamatan Ketungau Hulu terdapat 98 Kepala Keluarga dengan total 600 jiwa.

**Tabel 4.1**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Rasau Kecamatan Ketungau Hulu tahun 2013**

No.	Pekerjaan Penduduk	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Petani	68 Orang	70
2	Pedagang	15 Orang	15
3	Pegawai Negeri Sipil	8 Orang	8
4	TNI	1 Orang	1
5	POLRI	1 Orang	1
6	Pegawai Swasta Dan lain-lain	5 Orang	5
Jumlah		98	100

Sumber : *Data Kecamatan Ketungau Hulu 2013*

Pada table 4.1 diatas menunjukkan bahwa 90% penduduk Desa Rasau Jaya mempunyai mata pencaharian sebagian besar adalah petani. Ini dipengaruhi oleh keadaan alam pedesaan yang merupakan daerah pertanian, selain itu tidak adanya berbagai perusahaan yang masuk di Kecamatan Ketungau Hulu, maka dari itu masyarakat hanya mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian.

## 2. Kondisi Sekolah

Lembaga Sekolah dibentuk atau didirikan untuk mewujudkan cita - cita bangsa dalam mencerdaskan anak - anak bangsa. Suatu organisasi termasuklah sekolah pastilah mempunyai visi yang ingin dicapai, visi dapat diartikan sebagai gambaran keadaan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Visi Sekolah Dasar 07 Rasau adalah “Berdisiplin, Berprestasi, Budaya Bersih dan Bermartabat di masyarakat untuk mencerdaskan bangsa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun”. Untuk mencapai pernyataan visi tersebut, Sekolah Dasar 07 Rasau menetapkan pernyataan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan aparatur sekolah yang berdisiplin dan Bermartabat.
2. Meningkatkan kecerdasan siswa yang mampu bersaing.
3. Mengusahakan lingkungan sekolah yang bersih, indah dan menyenangkan.
4. Menciptakan kepribadian siswa yang bermartabat.

Adapun tujuan dari Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih

lanjut. Merujuk pada tujuan pendidikan dasar tersebut, maka tujuan Sekolah Dasar 07 Rasau kecamatan ketungau hulu kabupaten sintang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, enak dan menyenangkan.
2. Meraih prestasi akademik maupun non akademik mulai tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten.
3. Menguasai dasar - dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi.
4. Menjadikan sekolah sebagai penggerak pendidikan dan diminati dilingkungan masyarakat sekitar.

Sekolah Dasar Negeri 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang terletak di Daerah Perbatasan Malaysia, memiliki personel 10 orang tenaga pendidik yang terdiri dari 1 (satu) orang kepala sekolah, 2 (dua) orang guru umum PNS, 1 (satu) orang guru agama PNS, 2 (dua) orang guru kontrak Daerah, serta 3 (tiga) orang guru honor Sekolah, 1 (satu) orang penjaga sekolah PNS. Jumlah siswa di Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang berjumlah 156 orang yang terdiri dari 70 orang laki-laki dan 86 orang perempuan.

Sekolah Dasar Negeri 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang berdiri pada tahun 1974 dengan memiliki luas tanah 18750 m<sup>2</sup> dengan panjang tanah 100 m dan lebar 187.5 m. Sekolah Dasar Negeri 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang memiliki 6 (enam) ruang belajar, 1 (satu) buah ruang kantor dan 1 (satu) buah rumah dinas kepala sekolah. 2 (dua) buah rumah dinas guru. Siswa Sekolah Dasar Negeri 07 Rasau Kecamatan Kerungau Hulu Kabupaten Sintang

tergolong dari keluarga yang kurang mampu, itu bisa dilihat dari pekerjaan orang tua yang mayoritas adalah petani, ditambah lagi pengetahuan dari orang tua yang berpendidikan rendah, serta pengaruh dari lingkungan tempat tinggal yang tergolong daerah pedalaman sehingga menambah berat beban mereka untuk membiayai keperluan sekolah. Oleh sebab itu program bantuan siswa miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat tepat dalam membantu siswa miskin untuk mencukupi keperluan sekolah seperti seragam, sepatu, buku dan perlengkapan sekolah lainnya, agar siswa yang kurang mampu dapat melanjutkan sekolahnya.

Sekolah Dasar Negeri 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang merupakan salah satu dari 10 Sekolah Dasar (SD) sederajat yang ada di Kecamatan Ketungau Hulu. Jumlah murid tahun 2012 / 2013 sebanyak 156 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Murid Pada Sekolah Dasar 07 Rasau Tahun 2012**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
1	<b>Laki-Laki</b>	70	45,16 %
2	<b>Perempuan</b>	86	54,84 %
	<b>Jumlah</b>	<b>156</b>	<b>100 %</b>

Sumber : *Data SDN 07 Rasau Tahun 2012*

Dari data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah murid perempuan lebih banyak dari murid laki - laki. Jumlah murid perempuan sebesar 54,84 % dari jumlah murid keseluruhan. Usia murid pada Sekolah Dasar 07 Rasau berkisar 5 - 15

tahun. Jumlah murid terbanyak adalah pada usia 7 (tujuh) tahun sedangkan yang terkecil adalah pada usia 5 (lima) Tahun.

Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah guru berdasarkan jenis kelamin pada Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Guru Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada SDN 07 Rasau Tahun 2012**

No.	Jenis Kelamin	Pendidikan			Jumlah
		SPG/SMA	Diploma	Sarjana	
1	Laki-laki	1		3	4
2	Perempuan	5			5
	<b>Jumlah</b>	6		3	9

Sumber: *Data SDN 07 Rasau Tahun 2012*

Dari data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin guru pada Sekolah Dasar 07 Rasau sebagian besar adalah Perempuan. Sedangkan jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan pada Sekolah Dasar 07 Rasau sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan sebagian besar adalah berpendidikan SPG/SMA.

Untuk sarana dan prasarana pada Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Sarana dan Prasarana Pada Sekolah Dasar 07 Rasau Tahun 2012**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Unit	Baik	Rusak
1	Bangku Murid untuk 2 orang	75	Baik	-
2	Papan Tulis	6	Baik	-
3	Papan Absen	6	Baik	-

4	Lemari	3	Baik	-
5	Rak Buku	2	Baik	-
6	Meja Guru	6	Baik	-
7	Kursi Guru	6	Baik	-
8	Mesin Tik	1	Baik	-
9	Buku Perpustakaan	200	Baik	-
10	Alat Peraga Torso	-	-	-
11	Alat Peraga Globe	5	Baik	-
12	Alat Peraga Peta	6	Baik	-
13	Alat Peraga Gambar Botani	-	-	-
14	Ruang Kelas	6	-	Rusak
15	Rumah Dinas Kepala Sekolah	1	-	Rusak
16	Rumah Dinas Guru	2	-	Rusak

Sumber: *Data SDN 07 Rasau Tahun 2012*

Dari data di atas, dapat diketahui sarana dan prasarana pada Sekolah Dasar 07 Rasau seperti : bangku murid untuk 2 orang, papan tulis, papan absen, lemari, rak buku, meja guru, kursi guru, mesin tik, buku perpustakaan, alat peraga globe, alat peraga peta, dalam keadaan baik, serta ruang kelas seluruhnya. Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Rumah Dinas Guru dalam kondisi rusak.

Kewajiban guru Sekolah Dasar sebagai pengajar antara lain adalah : membuat perangkat program pengajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, melaksanakan analisis pekerjaan siswa, menyusun program perbaikan, membuat daftar nilai siswa, mengembangkan dan menumbuhkan kreatifitas siswa serta membuat catatan kemajuan belajar siswa. Sedangkan sebagai pembimbing guru Sekolah Dasar berkewajiban mencapai kemampuan dan standar minimal yang ditetapkan sesuai kurikulum yang berlaku serta membantu mengatasi kesulitan belajar perlu dilaksanakan bimbingan belajar melalui program perbaikan

oleh guru kelas masing-masing. Bimbingan belajar dapat juga diberikan kepada siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.

Guru Sekolah Dasar sebagai pendidik diharapkan memiliki sikap pandai bergaul dengan anak usia Sekolah Dasar dan bersifat sabar kepada siswa, kasih sayang, dapat menumbuhkan kemauan belajar siswa, memiliki sikap kasih sayang kepada siswa, dapat mengembangkan kreativitas, serta dapat memberikan keteladanan dalam bersikap, berperilaku, dan bertutur kata yang baik, sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

Aspek prestasi kerja guru dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain selalu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, mempunyai pengalaman yang luas dibidang tugasnya, mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk dibidang tugasnya, mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk dibidang tugasnya, mempunyai keterampilan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya, bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya kalau ada dorongan, hasil kerja yang dicapai rata-rata baik, dalam arti mutu maupun jumlah serta tidak sering terganggu kesehatan jasmani dalam pelaksanaan tugas.

Para guru diharapkan selalu berusaha memberikan saran yang dipandanginya baik dan berguna kepada atasan, baik diminta atau tidak diminta, mengenai atau yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas. Selain itu juga berusaha mencari tata cara kerja baru dalam mencapai daya guna dan hasil guna.

## B. Hasil

Kebijakan Kepala Sekolah dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang. Berhasil tidaknya suatu rencana atau kebijakan Kepemimpinan menjadi hal penting. Kepemimpinan adalah individu atau kelompok dalam suatu posisi yang memiliki wewenang untuk mengendalikan mengarahkan pekerjaan orang lain. Peraturan Pemerintah Nomor 28, pasal 12 ayat 1 Tahun 1990, menyebutkan bahwa “Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana”. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan, kebijakan Kepala Sekolah dapat dilihat dari usaha yang dilakukan dalam penyaluran bantuan siswa miskin, supaya siswa yang kurang mampu dapat menyelesaikan sekolahnya ditingkat sekolah dasar. Kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah, mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan demi tercapainya tujuan dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan demikian agar tujuan sekolah dapat tercapai, seorang kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan suatu gaya dalam memimpin yang dikenal dengan gaya kepemimpinan. Menurut Handoko ( 1999 : 234 ) “bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran”. Kepala Sekolah sebagai pemimpin disekolah bertugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan tertib dan lancar, dengan demikian kemampuan dalam menyelenggarakan administrasi pendidikan disekolah

harus dikuasai Kepala Sekolah. Sumidjo ( 2003 : 449 – 450 ), mengemukakan empat pola perilaku kepemimpinan yang lazim disebut gaya kepemimpinan yaitu perilaku instruktif, konsultatif, partisipatif dan delegatif. Perilaku kepemimpinan tersebut mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut :

- a) Perilaku instruktif. Komunikasi satu arah, pimpinan membatasi peranan bawahan, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab pemimpin, pelaksanaan pekerjaan diawasi dengan ketat.
- b) Perilaku Konsultatif, Pemimpin masih memberikan instruksi yang cukup besar serta menentukan keputusan, diharapkan komunikasi dua arah dan memberikan supportif terhadap bawahan, pemimpin mau mendengar keluhan dan perasaan bawahan tentang pengambilan keputusan, bantuan terhadap bawahan ditingkatkan tetapi pelaksanaan keputusan tetap pada pemimpin.
- c) Perilaku Partisipatif, Kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan antara pemimpin dan bawahan seimbang, pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan, komunikasi dua arah semakin meningkat, pemimpin semakin mendengarkan secara intensif terhadap bawahan nya, keikutsertaan bawahan dalam pemecahan dan pengambilan keputusan makin bertambah.
- d) Perilaku Delegatif, Pemimpin mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan bawahan dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya kepada bawahan, bawahan diberi hak untuk menentukan langkah-langkah bagaimana keputusan dilaksanakan, dan bawahan diberi wewenang untuk

menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan keputusan sendiri. Kepemimpinan yang baik dapat membangun tanggung jawab yang memberi contoh atau teladan dan komitmen yang baik untuk menjalankan fungsinya sebagai pemimpin yang bijaksana untuk meningkatkan mutu pendidikan, kepala sekolah bersikap proporsional dalam menjalankan program-program pendidikan.

Majunya sebuah lembaga sekolah dalam rangka mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa, bukanlah hanya tugas dari kepala sekolah, tetapi peranan para guru serta kerjasama dengan komite, orang tua murid yang juga ikut berperan serta mendidik siswa-siswa. Para guru berkewajiban memberikan ilmu dan menanamkan budi pekerti akhlak mulia, sehingga para siswa memiliki sikap yang baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan masyarakat, guru menjadi panutan dan teladan bagi para siswa. Peranan komite dan para orang tua turut mendukung semua program-program sekolah agar tercipta hubungan yang harmonis, sehingga mampu bekerja sama mencerdaskan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa sehingga tercapai tujuan pendidikan dalam menuntaskan wajib belajar sembilan tahun.

Program pemerintah memberikan bantuan siswa miskin bagi para siswa dari keluarga yang kurang mampu sangat membantu siswa miskin untuk melanjutkan sekolah. Sehingga tidak terjadi putus sekolah ditengah jalan. Akuntabilitas kepala sekolah terhadap program pemerintah. Bekerjasama dengan para guru dan komite sekolah dalam mencari data. Siswa miskin yang layak untuk mendapatkan Bantuan Siswa Miskin, Kepala Sekolah mengadakan rapat dengan para guru untuk

menentukan siswa dari keluarga miskin yang akan di usulkan untuk mendapatkan bantuan biaya sekolah, mengingat keterbatasan kuota penerima Bantuan Siswa Miskin dari Pemerintah terbatas.

Rapat dilakukan antara dewan guru, Komite dan Kepala Sekolah untuk memperoleh atau menentukan siswa-siswa yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan, mengingat Siswa Sekolah Dasar 07 Rasau berjumlah 156 orang semuanya tergolong miskin. Penentuan jumlah atau kuota calon penerima bantuan sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebanyak 45 siswa.

Kerjasama antara dewan guru, komite dan Kepala Sekolah untuk menentukan calon-calon penerima bantuan, karena tidak semua siswa Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang yang mendapatkan bantuan dana Bantuan Siswa Miskin disebabkan keterbatasan dana yang diberikan oleh Pemerintah. Penentuan calon penerima bantuan memang diperuntukan untuk siswa yang memang mengalami masalah dalam hal memenuhi kebutuhan, sekolah dan siswa yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan yang menjadi ketentuan.

Kebijakan kepala sekolah terhadap siswanya, agar para siswa Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang memiliki motivasi untuk melanjutkan sekolah. Kepala Sekolah memotivasi siswa-siswanya supaya tidak putus ditengah jalan. Kebijakan Kepala Sekolah dalam melakukan pendataan yang akurat dan benar agar tidak terjadi kesalah pahaman antara siswa lainnya yang belum

mendapatkan bantuan siswa miskin. Pendataan juga dilakukan supaya bantuan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah dapat membantu siswa dari keluarga miskin yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah.

Bantuan yang diberikan untuk menghindari menurunnya mutu pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, pemerintah perlu memberikan perhatian dan berupaya membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, karena majunya sebuah negara bergantung pada anak-anak bangsa sebagai generasi penerus, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Oleh karena itu pemerintah memberikan kesempatan bagi anak - anak yang kurang mampu untuk melanjutkan sekolah.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pencapaian Tujuan Kebijakan Bantuan Siswa Miskin**

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002 : 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Berdasarkan dari hasil penelitian salah satu upaya untuk menanggulangi siswa putus sekolah dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 Tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat Undang - Undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta satuan pendidikan yang sederajat. Istilah yang digunakan dalam panduan pelaksanaan bantuan siswa miskin sebagai berikut:

- a. Bantuan bagi siswa miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Siswa adalah siswa yang belajar di SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, baik negeri maupun swasta.
- c. Penerima BSM adalah siswa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Siswa miskin adalah siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya.

Pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang telah diprogramkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Karena salah satu penyebab siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah kesulitan dalam mencukupi keperluan sekolah disebabkan karena kemiskinan, sehingga orang tua tidak mampu memenuhi biaya anaknya untuk sekolah, baik biaya operasional maupun biaya pribadi siswa.

Pemerintah mengembangkan program Bantuan Siswa Miskin sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dampak krisis yang terjadi.

Adapun tujuan memberikan bantuan siswa miskin adalah untuk membantu siswa miskin dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti : membeli baju, sepatu, tas sekolah, transportasi kesekolah dan kebutuhan lainnya memberikan motivasi bagi siswa untuk melanjutkan sekolahnya, mengurangi siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar, mengurangi beban biaya pada orang tua siswa dari keluarga kurang mampu, mengurangi siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar, mewujudkan percepatan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, menurut Crawford ( 2000 ; 30 ), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah :

- 1) Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
- 2) Untuk memberikan Objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
- 3) Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
- 4) Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan Bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama (Umar, 2002 : 40), yaitu ; a. *Utility* (manfaat) Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program

yang sedang berjalan. b. *Accuracy* (akurat) Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi. c. *Feasibility* (layak) Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

### **1.1. Penentuan Kriteria Penerima Bantuan Siswa Miskin**

Bantuan Siswa Miskin yang diprogramkan oleh pemerintah diperuntukkan bagi siswa miskin yang terancam akan putus sekolah. Siswa miskin yang akan dicalonkan sebagai penerima bantuan harus memenuhi kriteria yang menjadi syarat penerima bantuan. Adapun kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut.

1. Siswa berasal dari keluarga miskin
2. Masih berstatus siswa Sekolah Dasar.
3. Siswa kelas I, II, III, IV, V, yang berhak menerima bantuan dan dibuktikan dengan rapor siswa.
4. Memiliki tingkat kehadiran 75 % di sekolah.
5. Memiliki kepribadian terpuji.
  - a. Rajin dan disiplin
  - b. Taat pada peraturan dan tata tertib sekolah
  - c. Berperilaku santun dan baik kepada orang lain
  - d. Tidak merokok atau menggunakan narkoba

Kriteria yang sudah ditentukan bagi calon penerima Bantuan Siswa Miskin harus dipenuhi siswa miskin, karena apabila tidak ditetapkan syarat-syarat seperti yang sudah dijelaskan, akan terjadi permasalahan pada siswa-siswa yang lain, karena semua siswa ingin mendapatkan bantuan sehingga mengaku dari keluarga miskin.

Dari kriteria diatas akan menjadi acuan bagi Kepala Sekolah dan dewan guru untuk menentukan siswa yang akan menjadi calon penerima bantuan dan tidak menimbulkan iri bagi siswa lain yang tidak mendapatkan Bantuan Siswa Miskin. Dengan demikian bantuan siswa miskin tepat pada sasaran untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan sekolah sehingga menyelesaikan sekolah.

Penentuan kriteria calon penerima bantuan berpedoman pada buku petunjuk Bantuan Siswa Miskin dari Kementerian Pendidikan Nasional. Supaya bantuan yang diberikan dapat meringankan beban orang tua dari siswa miskin. Hasil wawancara dengan dewan guru bahwa kriteria calon penerima bantuan memang sudah menjadi ketentuan yang harus dipenuhi oleh siswa miskin yang akan mendapatkan bantuan. sehingga bagi siswa lain yang tidak termasuk didalam kriteria calon penerima Bantuan Siswa Miskin tidak menimbulkan kecemburuan sosial dengan para siswa miskin yang mendapatkan bantuan.

Kriteria calon penerima Bantuan Siswa Miskin juga harus memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) lengkap dengan alamat siswa/sekolah dan kecamatan dimana sekolah itu berada sebelumnya pihak sekolah juga mengecek Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) agar persyaratan yang diajukan oleh pemerintah dapat terpenuhi. Berikut nama siswa penerima bantuan dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

**Tabel : 4.5 Daftar Nomor Induk Siswa Nasional ( NISN )**

No.	NISN	Nama	Alamat Sekolah	ID BANK	Kec.
1	0039808925	Dwika Sulistio	Rasau	301023323310031001	Ket.Hulu
2	0061930096	Siska Nogantika	Rasau	301023321412061003	Ket.Hulu
3	0075560863	Kristi Happy	Rasau	301023320702071002	Ket.Hulu
4	0074617074	Tri Elyada Putri	Rasau	301023322704071004	Ket.Hulu
5	0026102889	Siun	Rasau	301023321402022011	Ket.Hulu
6	0044340898	Adly Mespa Reza	Rasau	301023321807042001	Ket.Hulu
7	0046975009	Sherlye Frandhea Putri	Rasau	301023323107042010	Ket.Hulu
8	0045580278	Septimardiani	Rasau	301023323009042009	Ket.Hulu
9	0056013531	Mardiana Duli	Rasau	301023321304052006	Ket.Hulu
10	0056269506	Presti Riani	Rasau	301023322510052007	Ket.Hulu
11	0054523235	Ereckrisdianto	Rasau	301023321412052003	Ket.Hulu
12	0061886847	Gabriel	Rasau	301023321403062005	Ket.Hulu
13	0061338243	Ayen	Rasau	301023321104062002	Ket.Hulu
14	0065058928	Zipora	Rasau	301023321706062012	Ket.Hulu
15	0061729313	Franciskus Riki	Rasau	301023321607062004	Ket.Hulu
16	0068363693	Rhemal YaRhumerow	Rasau	301023321609062008	Ket.Hulu
17	0026611181	Keven Septianus	Rasau	301023320709013007	Ket.Hulu
18	0033159184	Ayub Sunadi	Rasau	301023322003023004	Ket.Hulu
19	0026611193	Elsy Fatma Maryanita	Rasau	301023320412023006	Ket.Hulu
20	0026611189	Melcy Hutcmerrl	Rasau	301023322610033009	Ket.Hulu
21	0038447233	Nesa Pramita	Rasau	301023321011033002	Ket.Hulu
22	0033159194	Yeskel	Rasau	301023323112033003	Ket.Hulu
23	0040216468	Femas Kristanto	Rasau	301023321502043001	Ket.Hulu
24	0044387122	Reni	Rasau	301023321205043010	Ket.Hulu
25	0047613989	Elli Melekh	Rasau	301023321909043005	Ket.Hulu
26	0052437343	Audrick Hizkia Permana	Rasau	301023321901053011	Ket.Hulu
27	0055256307	Lusi Lestari	Rasau	301023321503053008	Ket.Hulu
28	0026611170	Ejos	Rasau	301023322001024003	Ket.Hulu
29	0026611172	Marselina	Rasau	301023322004024007	Ket.Hulu

30	0026611191	Berneth Luis Nasario	Rasau	301023321111024002	Ket.Hulu
31	0033159189	Nictro Enjie Trahanord	Rasau	301023321407034009	Ket.Hulu
32	0036713031	Mardiyanus Toli	Rasau	301023322707034005	Ket.Hulu
33	0036713032	Sebastian. A	Rasau	301023322509034010	Ket.Hulu
34	0037305506	Elesia Berti Riani	Rasau	301023320410034004	Ket.Hulu
35	0042951043	Beni Desa Putra	Rasau	301023323012034001	Ket.Hulu
36	0042951045	Feni Nosanti	Rasau	301023320905044006	Ket.Hulu
37	0047111468	Nadia Decency	Rasau	301023322912044008	Ket.Hulu
38	9987550425	Rahel	Rasau	301023321210985009	Ket.Hulu
39	9997910617	Duriyana	Rasau	301023323112995002	Ket.Hulu
40	0006694653	Elsinta Dela Rosa	Rasau	301023320601005005	Ket.Hulu
41	0012450844	Ehod Argodi	Rasau	301023323003015003	Ket.Hulu
42	0012450852	Diggit Bitner. E	Rasau	301023321209015001	Ket.Hulu
43	0024468852	Jenni Paulinus Aquelela	Rasau	301023320902025006	Ket.Hulu
44	0047916456	Iis Dahlia	Rasau	301023321608045007	Ket.Hulu
45	0026611190	Novariana Masselli	Rasau	301023320610045008	Ket.Hulu

*Sumber: SDN 07 Rasau*

Dari data di atas menunjukkan bahwa siswa Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang yang ditetapkan sebagai Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin memiliki Nomor Induk Siswa Nasional dan sudah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pemerintah. Tetapi jika ada siswa yang diusulkan oleh kepala sekolah sebagai calon penerima Bantuan Siswa Miskin namun tidak memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tidak boleh memberikan persetujuan, sebelum pihak sekolah mengusulkan siswa yang bersangkutan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, untuk selanjutnya akan di proses untuk mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sesuai dengan mekanisme kriteria pendapatan yang berlaku.

Kebijakan Kepala Sekolah untuk mendata para siswa miskin yang ada di Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang mengacu pada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahan didalam menentukan calon penerima Bantuan Siswa Miskin.

Pendataan calon penerima bantuan dilakukan efektif dan efisien, dari segi efektif bahwa penentuan calon penerima bantuan harus tepat pada sasaran diperuntukkan bagi siswa miskin yang benar-benar memerlukan biaya sekolah agar siswa miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang dapat menyelesaikan pendidikan dasar, sehingga siswa miskin mendapatkan hak yang sama dengan siswa yang lain untuk memperoleh pendidikan tanpa dibebani dengan biaya keperluan sekolah, dan siswa miskin tidak lagi merasa minder dan terbelakang dengan siswa lain yang taraf ekonominya tergolong mampu.

Keefektifan pemberian bantuan oleh pemerintah kepada siswa miskin yang ada di Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang sangat membantu bagi orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi. Karena dari penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan adanya Bantuan Siswa Miskin sangat efektif untuk membantu para siswa miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang. Efektivitas dalam penentuan calon penerima bantuan bahwa Kepala Sekolah memilih siswa miskin berdasarkan kriteria yang ditentukan. Setiap siswa harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh sekolah.

Dari jumlah siswa Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang pada tahun pelajaran 2012 - 2013 sebanyak 156 orang dilakukan pendataan untuk memilih dan menentukan 45 siswa miskin yang diusulkan, untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin tanggung jawab kepala sekolah untuk mendata siswa yang benar-benar layak untuk memperoleh Bantuan Siswa Miskin.

Kebijakan Kepala Sekolah dalam pendataan calon penerima bantuan dilakukan secara efisien. Efisiensi biaya dalam penentuan calon penerima Bantuan Siswa Miskin tidak mengeluarkan biaya baik dari pihak sekolah maupun siswa.

Pendataan penentuan calon penerima Bantuan Siswa Miskin menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah untuk mencari data-data yang akurat bagi siswa miskin. Kepala Sekolah mengadakan rapat dengan dewan guru dan komite sekolah untuk menentukan calon penerima Bantuan Siswa Miskin, didalam rapat Sosialisasi yang dilakukan kepala sekolah mendapatkan keterangan dan data-data dari dewan guru dan ketua komite mengenai kondisi dari semua siswa Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.

Rapat Kepala Sekolah dan dewan guru beserta Komite dilakukan untuk memilih dan menentukan calon penerima Bantuan Siswa Miskin yang berhak menerima, pihak sekolah tidak perlu mengundang para orang tua dan masyarakat karena akan memakan biaya dan waktu yang bertele-tele, karena pada hakekatnya pihak sekolah sudah mengetahui siswa yang layak untuk mendapatkan bantuan dari awal siswa masuk sekolah dan rekomendasi dari guru-guru yang mengetahui kondisi

keluarga siswa miskin. Dalam rapat tersebut Kepala Sekolah, dewan guru dan Komite hanya memilih para siswa miskin yang memang pantas untuk mendapatkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sekolah, ketidakmampuan para orang tua dalam memenuhi keperluan sekolah seperti seragam, sepatu, buku dan lain-lain, dikarenakan tingginya harga barang tersebut sehingga tidak sesuai dengan penghasilan mereka.

Hasil rapat dewan guru, Komite dan Kepala Sekolah sudah diputuskan bahwa siswa yang layak menerima bantuan sebanyak 45 siswa. Berdasarkan hasil keputusan rapat penentuan calon penerima Bantuan Siswa Miskin untuk langkah selanjutnya kepala sekolah melakukan pengecekan langsung ke lapangan, mendatangi keluarga miskin yang akan ditentukan sebagai penerima bantuan.

Pendataan langsung kelapangan dilakukan kepala sekolah untuk melihat kondisi dari keadaan yang sebenarnya dilapangan, agar tidak terjadi kesalahan data atau apakah data yang didapat disekolah sesuai dengan keadaan dilapangan atau hanya rekayasa dikhawatirkan ada keluarga siswa yang hanya mengaku miskin untuk mendapatkan bantuan.

Efisien tenaga dengan sudah ditentukannya calon yang akan menerima bantuan akan mempermudah kinerja Kepala Sekolah langsung kepada sasaran calon penerima bantuan. Kepala sekolah mendatangi rumah para siswa miskin yang akan menerima bantuan dan melakukan tanya jawab dengan orang tua dari siswa Kepala Sekolah melihat kondisi kehidupan dari siswa miskin dan bertanya kepada setiap orang tua miskin tentang penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya atau setiap bulannya. Para orang tua siswa miskin harus bekerja sama dengan kepala sekolah dengan

menjawab dengan sejujur-jujurnya tanpa harus merasa malu dengan keadaan keluarganya.

Hasil wawancara dengan ketua Komite Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang bahwa didalam penentuan calon penerima bantuan, Kepala Sekolah dengan sukarela dan kerja keras meluangkan waktu dan tenaga untuk datang kepada keluarga siswa miskin dengan tujuan data yang diterima sesuai dengan kondisi di lapangan, siswa miskin yang akan diusulkan untuk mendapat bantuan memang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah untuk menyelesaikan pendidikan dasar.

Kebijakan Kepala Sekolah langsung kelapangan untuk menghindari apabila ada orang tua murid yang mencoba mengaku-ngaku miskin karena ingin mendapatkan bantuan, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan arti pentingnya bantuan belum terwujud.

Bantuan yang diberikan bukan untuk bagi-bagi uang namun bertujuan untuk membantu siswa miskin agar bisa melanjutkan pendidikan, untuk itu jangan sampai bantuan yang diberikan tidak tepat pada sasaran, tetapi berkat kerja keras kepala sekolah walaupun dengan bersusah payah mendatangi rumah para siswa yang sedang berjauhan dan dengan kondisi jalan yang rusak, tetapi tidak menyurutkan semangat Kepala Sekolah untuk membantu para siswa miskin agar memperoleh bantuan biaya sekolah. Kinerja Kepala Sekolah yang terjun langsung kelapangan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi, salah satunya banyak para orang tua yang

menginginkan anaknya mendapatkan bantuan juga, tetapi tidak memenuhi kriteria yang telah di tentukan.

Hasil wawancara dengan para orang tua siswa miskin mengatakan bahwa Kepala Sekolah mendatangi rumah mereka dan bertanya tentang keadaan dan kondisi dari keluarga miskin, menanyakan seberapa besar penghasilan yang diperoleh setiap hari atau setiap bulannya. Para orang tua mengatakan yang sebenar-benarnya mengenai keadaan dari keluarga siswa miskin tanpa ada yang disembunyikan supaya bantuan yang diberikan tepat pada sasaran. Bantuan diberikan untuk meringankan beban ekonomi para orang tua siswa yang mengalami kesulitan untuk membiayai keperluan sekolah. Kepala Sekolah mempunyai peranan yang sangat penting, untuk melihat hasil dari program yang dikeluarkan pemerintah. Kepala Sekolah turut membantu program pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Efisiensi waktu, pendataan calon penerima Bantuan Siswa Miskin tidak bertele-tele, karena letak Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang yang cukup jauh dari kota Kabupaten Sintang. Supaya mempercepat waktu pendataan dan pengurusan proses administrasi yang harus cepat dilakukan oleh Kepala Sekolah karena penyampaian usulan calon penerima bantuan harus segera disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Setelah proses seleksi di Sekolah dilakukan dan pihak sekolah sudah menentukan calon siswa yang akan diusulkan untuk menerima bantuan, selanjutnya kepala

sekolah membuat berita acara tentang surat keputusan dari Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang tentang penetapan calon siswa penerima bantuan berdasarkan dari pendataan langsung kelapangan serta hasil rapat dewan guru dan Komite Sekolah.

## **1.2 Hasil Pendataan Penerima Bantuan Siswa Miskin**

Proses pendataan telah selesai dilakukan, maka didapatkanlah 45 orang siswa yang memang layak dan benar-benar dari keluarga kurang mampu dan mengalami kesulitan dalam mencukupi biaya sekolah, sehingga layak untuk mendapatkan bantuan agar dapat melanjutkan sekolah. Dengan demikian Kepala Sekolah perlu mempersiapkan semua proses administrasi yang akan melengkapi proses pengusulan Bantuan Siswa Miskin. Calon siswa yang akan diusulkan harus memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan berdasarkan buku petunjuk pelaksana Bantuan Siswa Miskin.

Hasil wawancara dengan dewan guru bahwa sebelum pelaporan calon penerima Bantuan Siswa Miskin disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Kepala Sekolah dengan teliti dan seksama memeriksa kelengkapan berbagai persyaratan yang diperlukan sebagai kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Berdasarkan surat keputusan kepala sekolah melalui hasil rapat dewan guru dan Komite sekolah yang telah melakukan seleksi yang akurat berdasarkan kenyataan dilapangan, maka calon yang sudah ditentukan harus segera dilaporkan kepada pengelola program Bantuan Siswa Miskin tingkat Kabupaten untuk diproses dan didata supaya disetujui oleh Bupati agar memperoleh dana Bantuan Siswa Miskin.

## 2. Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Bantuan Siswa Miskin

Penetapan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin ditentukan setelah pendataan yang akurat dan sesuai dengan keadaan siswa yang memang mengalami kesulitan dalam mencukupi biaya sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah, khususnya kepala sekolah mengecek kebenaran dilapangan untuk selanjutnya diusulkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sesuai dengan jumlah kuota yang telah ditentukan dan sudah memenuhi segala administrasi atau persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan buku petunjuk pelaksana Kementerian Pendidikan Nasional. Seleksi kelengkapan administrasi siswa calon penerima Bantuan Siswa Miskin dilakukan ditingkat Kabupaten Sintang, apabila sudah memenuhi persyaratan untuk selanjutnya akan disetujui oleh Bupati. Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, untuk selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Pendidikan Nasional. Pengusulan Calon penerima Bantuan Siswa Miskin untuk membantu menanggulangi banyaknya anak-anak usia Sekolah Dasar yang tidak dapat meneruskan sekolah, karena masalah biaya pendidikan yang tidak mampu untuk dipenuhi oleh orang tua dari siswa miskin.

Efektivitas Bantuan Siswa Miskin yang diberikan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah pendidikan yang dihadapi setiap sekolah-sekolah yaitu masalah anak putus sekolah karena ketidakmampuan para orang tua untuk memenuhi keperluan sekolah. Kebijakan kepala sekolah didalam membantu program pemerintah

sangat membantu para siswa miskin, karena kebijakan Kepala Sekolah yang memahami kesulitan para siswanya sangat membantu para orang tua. Kebijakan Kepala Sekolah, yang mengecek langsung kelapangan akan mengatasi permasalahan, sehingga bantuan yang diberikan tepat pada sasaran dan dapat membantu permasalahan biaya sekolah bagi siswa yang kurang mampu.

Hasil observasi di lapangan bahwa banyak siswa Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang yang masih mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan sekolah tetapi berdasarkan survey dilapangan ditetapkanlah 45 siswa yang memang layak untuk diusulkan agar mendapatkan bantuan supaya setelah mendapat bantuan dapat mengurangi beban biaya para orang tua siswa miskin.

Efisiensi penetapan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin dari segi biaya diharapkan di keluarkan sekecil mungkin, dikarenakan letak Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia yang sangat jauh dari Kabupaten Sintang. Kebijakan didalam menetapkan siswa penerima bantuan dilakukan oleh pihak sekolah melalui pendataan yang benar dan akurat. Penetapan siswa penerima bantuan dilakukan setelah melalui berbagai proses dari mulai pendataan, pengecekan langsung kelapangna, setelah itu penentuan calon siswa yang berhak untuk menerima bantuan untuk kemudian oleh kepala sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk dilakukan pemeriksaan administrasi, apabila sudah memenuhi semua persyaratan,

selanjutnya disetujui oleh Bupati Sintang serta diterbitkan SK Penetapan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin tersebut.

Efisiensi penetapan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin dari waktu dan tenaga bahwa didalam penentuan siswa penerima bantuan, kepala sekolah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab untuk mensukseskan program pemerintah didalam membantu para siswa miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang yang mengalami kesulitan dalam mencukupi biaya sekolah. Setelah diterbitkan Surat Keputusan ( SK ) penetapan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dengan segera menyampaikan informasi secara terbuka melalui pengumuman yang ditempel di papan pengumuman, maupun pemberitahuan lewat surat kepada pihak sekolah. Pemberitahuan itu berisi bahwa siswa miskin yang di usulkan oleh Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang sudah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin, karena memang layak untuk memperoleh Bantuan Siswa Miskin.

Pihak sekolah menerima pemberitahuan penetapan siswa penerima bantuan dengan segera melengkapi semua administrasi yang diperlukan untuk mengambil dana Bantuan Siswa Miskin di Bank Kalbar. Berikut ini adalah nama-nama yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang yang berhak menerima Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang pada tahun 2012/2013.

**Tabel 4.6**  
**Daftar Penerima Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) Tahun 2012 / 2013**

No.	Nama Siswa	Kelas	Jumlah Uang
1	Dwika Sulistio		Rp. 450.000
2	Siska Nogantika		Rp. 450.000
3	Kristi Happy		Rp. 450.000
4	Tri Elyada Putri		Rp. 450.000
5	Siun		Rp. 450.000
6	Adly Mespa Reza		Rp. 450.000
7	Sherlye Frandhea Putri		Rp. 450.000
8	Septimardiani		Rp. 450.000
9	Mardiana Duli		Rp. 450.000
10	Presti Riani		Rp. 450.000
11	Ereckrisdianto		Rp. 450.000
12	Gabriel		Rp. 450.000
13	Ayen		Rp. 450.000
14	Zipora		Rp. 450.000
15	Franciskus Riki		Rp. 450.000
16	Rhemal Ya Rhumerow		Rp. 450.000
17	Keven Septianus		Rp. 450.000
18	Ayub Sunadi		Rp. 450.000
19	Elsy Fatma Maryanita		Rp. 450.000
20	Melcy Hutcmern		Rp. 450.000
21	Nesa Pramita		Rp. 450.000
22	Yeskel		Rp. 450.000
23	Femas Kristanto		Rp. 450.000
24	Reni		Rp. 450.000
25	Elli Melekh		Rp. 450.000
26	Audrick Hizkia Permana		Rp. 450.000
27	Lusi Lestari		Rp. 450.000
28	Ejos		Rp. 450.000
29	Marselina		Rp. 450.000
30	Berneth Luis Nasario		Rp. 450.000
31	Nictro Enjie Trahanord		Rp. 450.000
32	Mardiyanus Toli		Rp. 450.000
33	Sebastian. A		Rp. 450.000
34	Elesia Berti Riani		Rp. 450.000
35	Beni Desa Putra		Rp. 450.000
36	Feni Nosanti		Rp. 450.000
37	Nadia Decency		Rp. 450.000

38	Rahel		Rp. 450.000
39	Duriyana		Rp. 450.000
40	Elsinta Dela Rosa		Rp. 450.000
41	Ehod Argodi		Rp. 450.000
42	Diggit Bitner. E		Rp. 450.000
43	Jenni Paulinus Aquelela		Rp. 450.000
44	Lis Dahlia		Rp. 450.000
45	Nosariana Masselli		Rp. 450.000

*Sumber: SDN 07 Rasau*

Penerima Bantuan Siswa Miskin seperti tertera pada Tabel 4 yang menjadi usulan dari pihak sekolah dan yang mendapat surat keputusan (SK) penetapan sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin sebanyak 45 orang. Setelah mendapat surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, pihak sekolah dengan segera memberitahukan kepada orang tua dari siswa miskin yang ditetapkan sebagai penerima bantuan untuk bermusyawarah mengenai proses pengambilan dana Bantuan Siswa Miskin pada Bank Kalbar di Sintang yang dengan segera harus dicairkan. Musyawarah dilakukan pihak sekolah dengan orang tua wali siswa miskin dihadiri oleh Komite dan aparat desa yang nanti akan mengawasi jalannya penyaluran Bantuan Siswa Miskin tersebut.

Maksud dari musyawarah tersebut adalah untuk memberitahukan kepada orang tua/wali siswa miskin mengenai penetapan siswa penerima bantuan sekaligus mekanisme pengambilan dana yang akan dilakukan pada Bank Kalbar Sintang. Dari hasil musyawarah tersebut diambil kesepakatan bahwa memberikan kuasa kepada kepala sekolah untuk mengambil dana bantuan yang disetujui oleh para orang tua siswa penerima bantuan dan diketahui oleh Komite Sekolah.

Efisiensi waktu, pemberian kuasa kepala kepala sekolah dengan alasan bahwa pencairan dana harus segera dilakukan apabila semua orang tua atau siswa miskin turt serta mencairkan dana bantuan akan memerlukan waktu yang lama karena letak Sekolah Dasar 07 Rasau yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten Sintang, sehingga tidak memungkinkan untuk membawa semua siswa penerima bantuan.

Efisiensi tenaga dan biaya pemberian kuasa kepada Kepala Sekolah juga menghemat tenaga dan menghemat biaya, karena letak Sekolah Dasar 07 Rasau jauh memerlukan biaya yang besar, apabila setiap siswa mencairkan sendiri dana yang diterimanya, maka dana bantuan tersebut akan habis untuk ongkos transportasi dan akomodasi saja, serta ketidaktahuan para orang tua atau siswa miskin untuk mengurus semua administrasi yang diperlukan dalam pencairan dana tersebut.

Oleh sebab itu sangatlah tepat memberikan kuasa kepada Kepala Sekolah untuk mencairkan dana bantuan, karena Kepala Sekolah sudah menunjukkan tanggung jawab dan kebijakan yang tepat dalam melakukan pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan sehingga siswa yang diusulkan mendapatkan bantuan, serta dipahami pula Kepala Sekolah lebih memahami prosedur dalam pencairan dana Bantuan Siswa Miskin. Dari hasil musyawarah juga diambil keputusan bahwa dalam pengambilan dana bantuan memberikan hak kepada Kepala Sekolah untuk melakukan pemotongan dari dana bantuan yang diterima sebesar Rp. 35.000 /siswa, dengan maksud membantu Kepala Sekolah dalam mengurus administrasi pencairan dana bantuan dan transportasi serta akomodasi Kepala Sekolah ke Kabupaten Sintang.

Dari hasil wawancara dengan para orang tua siswa penerima bantuan mengatakan bahwa pemotongan tersebut dengan sukarela tanpa paksaan diberikan oleh para orang tua siswa yang mendapatkan bantuan di saksikan oleh Komite Sekolah dan aparat desa, karena mengingat jasa dan kerja keras Kepala Sekolah yang rela berkorban meluangkan waktu dan tenaga untuk memperjuangkan nasib para siswa miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang, agar mendapatkan Dana Bantuan Siswa Miskin sehingga anak mereka tidak berhenti sekolah.

### 3. Hasil Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Siswa Miskin

Untuk melaksanakan dan menentukan jumlah penerima Penyaluran Bantuan Miskin Sekolah Dasar (BSM - SD) di setiap sekolah, maka dalam pelaksanaan dilakukan dalam beberapa tahap atau langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar penyaluran Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ( 2011 : 5-7 ) yaitu :

- Langkah 1 : Tim Pusat menentukan alokasi jumlah siswa penerima BSM - SD untuk masing-masing provinsi.
- Langkah 2 : Tim Propinsi menentukan alokasi jumlah siswa penerima BSM - SD untuk setiap Kabupaten / Kota. Penetapan alokasi didasarkan pada indikator :
- a. Jumlah Siswa Miskin
  - b. Kondisi masyarakat yang tidak mampu / miskin

- c. Letak geografis, dan
- d. Kemudahan koordinasi
- e. Prinsip keadilan

Langkah 3 : Tim Kabupaten / Kota menetapkan sekolah calon penerima BSM - SD. Penetapan ini didasarkan pada jumlah siswa miskin yang ada dimasing-masing sekolah. Untuk keperluan tersebut, Tim Kabupaten / Kota meminta seluruh sekolah yang berhak menerima BSM - SD untuk mengirimkan daftar siswa miskin yang akan diusulkan memperoleh beasiswa ( Format F ), usulan dari wali kelas ( format B ), surat keterangan keadaan orang tua tidak mampu / miskin ( Format C ), dan data calon penerima BSM - SD ( Format D ).

Langkah 4 : Tim Kabupaten / Kota melakukan penetapan alokasi BSM - SD di tiap sekolah. Jika alokasi BSM - SD yang diterima Kabupaten / Kota mencukupi untuk seluruh siswa miskin yang diusulkan oleh sekolah, maka seluruh siswa yang diusulkan otomatis menerima BSM - SD. Bila jumlah usulan dari sekolah melebihi alokasi kabupaten / kota, sekolah dengan menggunakan mempertimbangkan tingkat kemiskinan sekolah ( Format I ).

Indikator yang dapat digunakan untuk menetapkan alokasi BSM - SD tiap sekolah antara lain :

- a. Jumlah siswa disekolah
- b. Jumlah siswa dari keluarga miskin disekolah tersebut
- c. Jarak sekolah ke ibukota ke kabupaten /kota, atau
- d. Indikator kota lainnya ( geografis, mata pencaharian, budaya, dll )

Didasarkan Tim Kabupaten / Kota melakukan verifikasi keakuratan data usulan penerima BSM - SD yang dibuat oleh kepala sekolah.

Langkah 5 : Tim Kabupaten / Kota menerbitkan SK alokasi tiap sekolah penerima BSM - SD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan ( Format F ).

Langkah 6 : Surat Keputusan Penetapan Alokasi di tiap sekolah dikirim ke Pengelola Dana Dekonsentrasi Provinsi, Lembaga Penyalur dan ke Sekolah.

Langkah 7 : Sekolah yang telah menerima alokasi penerima BSM - SD dari Tim Kabupaten / Kota harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Kepala Sekolah bersama dengan wali kelas menentukan calon siswa penerima BSM - SD. Kriteria penentuannya adalah :

- 1) Siswa berasal dari keluarga miskin
  - 2) Pada tahun anggaran 2012 masih berstatus siswa SD
  - 3) Siswa kelas I, II, III, IV, V yang berhak menerima beasiswa dan dibuktikan dengan rapor siswa
  - 4) Memiliki tingkat kehadiran 75 % disekolah
  - 5) Memiliki kepribadian terpuji
    - a) Rajin dan disiplin
    - b) Taat pada peraturan dan tata tertib sekolah
    - c) Berperilaku santun dan baik kepada orang lain
    - d) Tidak merokok atau menggunakan narkoba
- b) Hasil penetapan siswa penerima BSM - SD tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan kepala sekolah, dan dipasang pada papan pengumuman sekolah ( Format F ).

### **3.1 Pencairan Dana**

Pencairan dana Bantuan Siswa Miskin dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Kas Daerah Kabupaten Sintang. Untuk selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menyalurkan kepada siswa penerima bantuan melalui Bank KalBar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

menginformasikan kepada pihak sekolah bahwa dana Bantuan Siswa Miskin sudah dapat diambil oleh siswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.

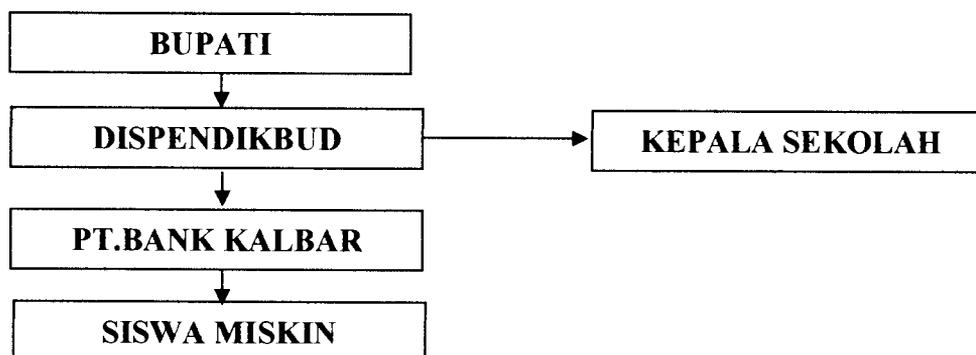
Hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa adanya kesamaan antar sekolah-sekolah yang di pedalaman dalam pengambilan dana Bantuan Siswa Miskin yaitu pengambilan dilakukan secara kolektif oleh Kepala Sekolah.

Hasil wawancara dengan orang tua siswa penerima Bantuan Siswa Miskin mensepakati memberikan kuasa kepada Kepala Sekolah dengan alasan letak Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu ke Kabupaten Sintang cukup jauh, alasan lain dikarenakan akan membutuhkan biaya yang besar apabila semua siswa penerima bantuan tersebut mengambil sendiri, serta dikhawatirkan adanya ketidaktahuan para siswa untuk mengurus administrasi pengambilan dana bantuan tersebut.

Efisiensi pemberian kuasa kepala sekolah untuk mencairkan dana bantuan pada Bank KalBar sangat berguna untuk memperkecil biaya pengeluaran, apabila dibandingkan dengan siswa yang mengambil sendiri dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), selain itu menghemat waktu dan tenaga, karena hanya kepala sekolah yang mencairkan dana bantuan, sehingga para orang tua atau siswa tidak perlu membuang waktu dan tenaga, karena setelah dana tersebut dicairkan Kepala Sekolah akan segera menyalurkan dana tersebut kepada siswa miskin yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Berdasarkan buku petunjuk dari Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pencairan dana Bantuan Siswa Miskin pada Bank KalBar dilakukan berkisar antara bulan Agustus sampai dengan Desember. Oleh sebab itu pengambilan dana bantuan harus segera dilakukan apabila sudah ada

informasi tentang pencairan dana Bantuan Siswa Miskin sudah bisa dicairkan. Berikut ini disajikan bagan penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kabupaten Sintang.

**Bagan 4.1**  
**Alur Penyaluran Bantuan Siswa Miskin di Kabupaten Sintang**



Pencairan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) di ambil langsung oleh siswa penerima bantuan dengan syarat :
  - a) Surat Keterangan dari kepala sekolah yang menerangkan siswa yang bersangkutan benar bersekolah dimasing-masing jenjang.
  - b) Menunjukkan Surat Keterangan ( SK ) penerima dana Bantuan Siswa Miskin ( BSM ).
  - c) Menandatangani bukti penerimaan dana Bantuan Siswa Miskin yang disediakan oleh Bank KalBar.

2. Pencairan Dana Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) dapat dilakukan secara kolektif oleh kepala sekolah dengan syarat :
  - a) Lokasi sekolah yang jauh, terpencil dan terisolir secara geografis dari Kabupaten Sintang.
  - b) Ada surat kuasa kolektif dari siswa penerima Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) yang telah ditanda tangani oleh siswa yang bersangkutan.
  - c) Membawa Surat Keterangan ( SK ) penerima Bantuan Siswa Miskin ( BSM )
3. Kepala Sekolah penerima kuasa harus segera menyerahkan dana Bantuan Siswa Miskin ( BSM ), apabila sudah selesai mencairkan dana bantuan pada Bank KalBar. Siswa menandatangani kembali daftar penerimaan Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) sebagai bukti penerimaan untuk kepala sekolah.

Dari hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa pencairan yang dikuasakan kepada Kepala Sekolah sangatlah efektif, karena didalam pencairan tersebut ada berbagai syarat atau administrasi yang harus dilengkapi oleh para siswa, oleh sebab itu apabila siswa sendiri yang melakukan pencairan dan tidak melengkapi administrasi yang diperlukan akan bikin para siswa penerima Bantuan Siswa Miskin kesulitan untuk pencairannya.

Hasil wawancara dengan para orang tua siswa miskin mengatakan bahwa mereka sangat berterima kasih karena berkat kerja keras Kepala Sekolah, anak-anak mereka mendapatkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan sekolah.

PT. Bank KalBar sebagai wadah yang ditunjuk dalam menyalurkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), dengan teliti memeriksa kelengkapan administrasi bagi siswa miskin penerima bantuan, supaya bantuan yang diberikan dapat efektif dirasakan oleh siswa miskin dari keluarga kurang mampu. Bank KalBar sebagai pihak yang dipercayakan untuk menyalurkan dana Bantuan Siswa Miskin juga sudah mempunyai daftar nama-nama siswa penerima bantuan tersebut.

Pencairan dana Bantuan Siswa Miskin sudah dilakukan oleh kepala sekolah yang diberi kuasa oleh siswa untuk mencairkan dana bantuan pada Bank KalBar, untuk selanjutnya pihak sekolah mengundang para orang tua siswa penerima Bantuan Siswa Miskin, Komite Sekolah, serta aparat desa, maksud dari undangan untuk menyalurkan dana bantuan yang telah diterima. Komite dan aparat desa bertindak sebagai pengawas didalam penyaluran Bantuan apabila terjadi penyimpangan dalam penyaluran tersebut.

### **3.2 Penyaluran Dana**

Penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dilakukan secara terbuka, dimana Kepala Sekolah mengundang para orang tua siswa penerima bantuan dari Komite Sekolah serta aparat desa untuk mengawasi secara langsung terhadap penyerahan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Kepala Sekolah meminta kepada orang tua siswa miskin untuk menerima dana bantuan.

Adapun besarnya dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diterima setiap siswa penerima bantuan adalah Rp. 450.000 per tahun atau Rp. 225.000 per semester, tetapi sesuai dengan kesepakatan dari awal bahwa dana yang diterima akan dipotong

sebesar Rp. 35.000 per siswa, pemotongan diberikan kepada Kepala Sekolah dengan sukarela dan ikhlas untuk membantu biaya transportasi, akomodasi, dan biaya administrasi dalam pencairan dana Bantuan Siswa Miskin pada Bank KalBar yang ada di Sintang.

Hasil wawancara dengan orang tua siswa penerima bantuan bahwa besarnya potongan yang disepakati tidaklah memberatkan mereka, dibandingkan dengan tanggung jawab dan kerja keras Kepala Sekolah memperjuangkan nasib siswa miskin agar memperoleh bantuan biaya sekolah, para orang tua miskin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah khususnya Kepala Sekolah atas kinerjanya yang penuh tanggung jawab terhadap siswa Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.

Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang, langsung diserahkan kepada orang tua / wali siswa miskin penerima bantuan, besarnya dana Bantuan Siswa Miskin yang diterima setiap siswa setelah dipotong untuk membantu transport Kepala Sekolah dalam pencairannya sebesar Rp. 415.000,- setelah menerima dana bantuan tersebut para orang tua siswa miskin menandatangani Berita Acara penyerahan dana bantuan. Berita acara yang ditandatangani para orang tua siswa miskin ini merupakan bukti bahwa dana bantuan sudah diserahkan kepada orang tua siswa penerima bantuan yang disaksikan oleh Komite Sekolah dan aparat desa.

Setelah menyerahkan bantuan kepada siswa miskin, Kepala Sekolah berpesan supaya bantuan yang diterima dapat dipergunakan untuk mencukupi keperluan

sekolah seperti seragam sekolah, buku-buku, tas serta biaya transportasi ke sekolah, setelah mendapatkan bantuan siswa miskin tidak ada lagi siswa dari keluarga kurang mampu yang berhenti sekolah karena alasan biaya.

Efektivitas pemberian bantuan harus sesuai dengan keadaan siswa yang benar-benar memerlukan untuk mencukupi biaya sekolah. Efisiensi penyaluran dana bantuan oleh Kepala Sekolah hanya memanggil para orang tua siswa penerima bantuan, Komite Sekolah dan aparat desa, penyaluran harus segera dilakukan supaya dana bantuan dapat dengan segera di gunakan untuk membantu para siswa miskin, supaya dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan sekolah Anak-anak mereka.

Efisiensi kebijakan Kepala Sekolah terhadap proses penyaluran dana yang sudah diterima berjalan dengan lancar tanpa adanya penyimpangan yang terjadi. Kebijakan Kepala Sekolah dalam menyalurkan Bantuan yang diterima sudah sesuai dengan prosedur penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) dimana Kepala Sekolah dengan segera menyalurkan bantuan setelah pencairan dana nya .

Dari hasil observasi yang dilakukan selama penelitian bahwa Kepala Sekolah sudah menjalankan tugas serta kewajibannya dalam membantu para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan mengusulkan kepada pemerintah agar memperoleh bantuan biaya sekolah.

Dari hasil usulan tersebut ditetapkanlah sebanyak 45 siswa Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang yang memang layak untuk mendapatkan bantuan. Kebijakan Kepala Sekolah didalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) sudah efektif dan efisien. Efektif dari penetapan calon penerima sudah

sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan sesuai dengan buku petunjuk pelaksana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Siswa yang menerima bantuan memang benar berasal dari keluarga kurang mampu, itu berarti bahwa bantuan yang diberikan tepat guna untuk membantu para siswa miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu agar tidak putus sekolah di tengah jalan.

Kebijakan Kepala Sekolah efisien dari segi waktu, bahwa pada penetapan calon penerima bantuan dilakukan segera, mungkin dan tidak bertele-tele sehingga dengan segera dapat dilaporkan kepada Tim Bantuan Siswa Miskin di tingkat Kabupaten yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Efisien tenaga bahwa Kepala Sekolah bekerja sama dengan para guru dan orang tua serta komite untuk secara bersama menentukan calon penerima bantuan, dari segi efisien biaya, bahwa kinerja Kepala Sekolah yang bekerja keras membantu para siswanya agar dapat bersekolah tanpa meminta imbalan atau tidak memberatkan para orang tua. Pada akhir penyaluran dana para orang tua bersepakat untuk membantu Kepala Sekolah dalam hal transportasi, akomodasi dan urusan administrasi pencairan dana Bantuan Siswa Miskin, sekali lagi perlu ditekankan bahwa potongan terhadap dana bantuan bukan.

### **3.3. Penggunaan Dana**

Tujuan dari Program Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) adalah membantu para siswa miskin yang mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sekolah sehingga pada akhirnya akan terancam putus sekolah. Efektivitas penyaluran Bantuan

Siswa Miskin untuk membantu para siswa miskin, diharapkan setelah dana diterima dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan sekolah.

Para orang tua siswa penerima bantuan dengan jeli dan seksama melihat kebutuhan sekolah yang akan dibeli. Penggunaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah diantaranya membeli seragam sekolah, sepatu, tas, alat-alat tulis, buku dan transportasi pulang pergi siswa dan lain-lain keperluan yang menunjang proses pembelajaran. Penggunaan dana harus secara efektif, kebutuhan mana yang harus segera dipenuhi.

Orang tua sebagai penanggung jawab terhadap dana yang diterima, dengan efektif menggunakan dana bantuan tersebut. Komite Sekolah dan aparat desa sebagai pengawas dalam penggunaan dana bantuan siswa miskin, memberikan petunjuk kepada para orang tua, agar dana yang diterima sebesar Rp. 450.000,- /tahun dapat dipergunakan sebaik - baiknya di pastikan untuk mencukupi keperluan sekolah anak-anak mereka..

Hasil wawancara dengan orang tua siswa bahwa bantuan yang diberikan pemerintah sangat membantu anak-anaknya dalam sekolah, karena para orang tua siswa miskin, tidak lagi kesulitan dalam mencukupi peralatan sekolah tersebut. Harapan seluruh orang tua siswa Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diprogramkan pemerintah dalam membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu akan terus berlanjut, agar para siswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Dari hasil observasi yang dilakukan selama penelitian bahwa Kepala Sekolah sudah menjalankan tugas serta kewajibannya dalam membantu para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan mengusulkan kepada pemerintah agar memperoleh Bantuan Siswa Miskin.

Dari hasil usulan tersebut ditetapkanlah sebanyak 45 siswa Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang yang memang layak untuk mendapatkan bantuan. Kebijakan Kepala Sekolah didalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) sudah efektif dan efisien. Efektif dari penetapan calon penerima sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan sesuai dengan buku petunjuk pelaksana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Siswa yang menerima bantuan memang benar berasal dari keluarga kurang mampu, itu berarti bahwa bantuan yang diberikan tepat guna untuk membantu para siswa miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang agar tidak putus sekolah ditengah jalan.

Kebijakan Kepala Sekolah efisien dari waktu, bahwa pada penetapan calon penerima bantuan dilakukan segera mungkin dan tidak bertele - tele sehingga dengan segera dapat dilaporkan kepada Tim Bantuan Siswa Miskin di tingkat Kabupaten yakni Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sintang. Efisien tenaga bahwa kepala sekolah bekerja sama dengan para guru dan orang tua serta komite untuk secara bersama menentukan calon penerima bantuan, dari segi efisien biaya, bahwa kinerja kepala sekolah yang bekerja keras membantu para siswanya agar dapat bersekolah tanpa meminta imbalan atau tidak memberatkan para orang tua. Pada akhir penyaluran dana para orang tua bersepakat untuk membantu Kepala Sekolah

dalam hal transportasi, akomodasi dan urusan administrasi pencairan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Sekali lagi perlu ditekankan bahwa potongan terhadap dana bantuan bukan permintaan dari Kepala Sekolah, tetapi bantuan yang diberikan secara sukarela oleh para orang tua siswa penerima bantuan.

Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan dari mulai pendataan siswa miskin yang dilakukan Kepala Sekolah, penetapan calon penerima, pengusulan calon penerima ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, sehingga kemudian ditetapkanlah sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Pada tahap pencairan yang dikuasakan kepada Kepala Sekolah untuk melakukan pencairan dana bantuan pada Bank KalBar, setelah itu barulah penyaluran kepada siswa miskin yang bersangkutan.

Hasil wawancara dengan Komite Sekolah, bahwa Kepala Sekolah melakukan penyaluran Bantuan Siswa Miskin setelah pengambilan dana bantuan pada Bank KalBar, penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) langsung diserahkan kepada para orang tua siswa dan tidak ada penyimpangan yang dilakukan, kecuali berdasarkan hasil kesepakatan bersama dilakukan pemotongan sebesar Rp. 35.000,- jadi dana yang diterima setiap siswa sebesar Rp. 415.000,-

Kepala Sekolah berpesan kepada siswa penerima bantuan, supaya mempergunakan bantuan yang diberikan secara tepat dan benar untuk mencukupi keperluan sekolah, bukan untuk membeli yang bukan keperluan sekolah.

Adapun tujuan dari penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) Sekolah Dasar, agar murid ditingkat Pendidikan Dasar yang berasal dari keluarga kurang mampu

dapat membiayai keperluan sekolahnya akibat dari kesulitan ekonomi sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, kemudian siswa miskin mempunyai kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, untuk itu diharapkan bantuan yang diberikan dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah, dengan adanya penyaluran bantuan dapat mengurangi angka putus sekolah di tingkat sekolah dasar.

Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyaluran Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang disaksikan oleh Komite dan Aparat Desa yang melakukan pengawasan langsung terhadap penyaluran bantuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Hasil wawancara dengan Komite sekolah bahwa Kepala Sekolah sudah bekerja keras, bertanggung jawab supaya siswa miskin pada Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang dapat merasakan bantuan biaya sekolah dari pemerintah. Kebijakan Kepala Sekolah dalam menyalurkan bantuan bagi siswa miskin berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan.

Para orang tua berharap pemerintah akan terus melanjutkan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) karena program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sangat membantu para keluarga kurang mampu dalam membiayai keperluan sekolah. Para orang tua siswa miskin juga mengharapkan pemerintah untuk menambah jumlah penerima bantuan karena masih banyak siswa miskin yang belum mendapatkan bantuan.

Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilakukan oleh Kepala Sekolah telah mencapai hasil, karena dari bantuan tersebut dapat membantu siswa-siswa Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Keberhasilan Kepala Sekolah dalam menyalurkan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tidak terlepas dari kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat di dalam lembaga sekolah tersebut, untuk kedepannya lagi diharapkan kinerja Kepala Sekolah dapat lebih ditingkatkan lagi.

Kinerja Kepala Sekolah yang efektif dan efisien dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) sangat membantu bagi keluarga yang kurang mampu untuk membiayai siswa yang mengalami kesulitan biaya sekolah. Hasil wawancara dengan para guru Sekolah Dasar 07 Rasau bahwa Kepala Sekolah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab tanpa membedakan status sosial para siswanya.

Siswa miskin yang menerima bantuan mengharapkan bahwa bantuan yang diberikan akan terus berkelanjutan sampai mereka menyelesaikan pendidikan dasar. Efektifitas pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu untuk membantu para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu agar tidak mengalami kesulitan biaya sekolah yang berakibat siswa tersebut akan putus sekolah. Efektifitas pemberian bantuan diberikan kepada siswa miskin yang memang mengalami kesulitan biaya sekolah yang dibuktikan dengan data-data yang akurat berdasarkan pengamatan langsung di lapangan yang dilakukan oleh kepala sekolah.

#### **4. Dampak Dari Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin**

Setelah menerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), Siswa Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang menampakan Efektivitas yang Signifikan baik dari segi semangat untuk ke sekolah maupun semangat dalam menerima pelajaran sehingga peluang anak dari keluarga tidak mampu yang menerima bantuan siswa miskin sangat kecil untuk putus sekolah di tengah jalan. Angka partisipasi sekolah lebih tinggi dan angka putus sekolah lebih rendah untuk semua siswa baik laki – laki maupun perempuan.

##### **4.1 Pengaruh Bantuan Siswa Miskin Terhadap Prestasi Siswa**

Pemberian BSM bukan semata ditujukan agar siswa tetap sekolah tanpa mengalami kejadian tinggal kelas atau putus sekolah, melainkan juga mendorong agar siswa dapat mencapai prestasi yang tertinggi. Prestasi siswa dalam studi ini diukur berdasarkan rapor pada tiga mata pelajaran ( Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam ) sebelum dan sesudah menerima BSM seperti tersaji pada Tabel 4.6. Jika nilai rapor lebih tinggi setelah menerima BSM maka kondisi tersebut potensial mengindikasikan adanya kontribusi BSM yang positif terhadap prestasi belajar siswa, demikian pun sebaliknya. Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum BSM berperan dalam meningkatkan hasil belajar siswa SD 07 Rasau pada mata pelajaran yang menjadi standar Ujian Nasional tingkat Sekolah Dasar yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan angka yang cukup berarti.

**Tabel 4.7**  
**Nilai Rapor Siswa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika**  
**dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2013 (responden guru)**

No.	Nama Siswa Penerima BSM	Nilai Rapor Sebelum Menerima BSM			Nilai Rapor Sesudah Menerima BSM		
		BI	MTK	IPA	BI	MTK	IPA
1	Dwika Sulistio	7.00	8.00	6.50	7.50	8.00	7.50
2	Siska Nogantika	6.00	5.00	8.00	7.00	6.00	8.50
3	Kristi Happy	6.00	4.50	8.00	6.50	5.50	8.00
4	Tri Elyada Putri	6.50	5.50	7.50	8.00	6.50	7.50
5	Siun	7.50	5.00	5.00	8.00	6.00	6.50
6	Adly Mespa Reza	7.00	6.00	5.50	7.00	7.00	7.50
7	Sherlye Frandhea Putri	7.00	6.50	7.50	8.00	6.50	7.50
8	Septimardiani	7.00	7.00	6.50	7.50	7.00	7.00
9	Mardiana Duli	7.50	7.00	8.00	8.00	7.50	9.00
10	Presti Riani	8.00	7.00	5.50	8.00	7.00	7.00
11	Ereckrisdianto	6.50	6.50	5.50	7.00	7.50	7.00
12	Gabriel	7.00	5.50	5.00	8.00	6.50	6.00
13	Ayen	7.00	5.00	7.50	8.00	7.00	8.00
14	Zipora	6.00	4.50	6.50	7.00	5.50	7.00
15	Franciskus Riki	6.00	5.00	7.00	7.00	7.50	7.50
16	Rhemal Ya Rhumerow	6.50	6.00	8.00	7.00	6.50	9.00
17	Keven Septianus	7.50	4.00	6.00	8.50	6.00	7.00
18	Ayub Sunadi	8.00	7.00	5.00	8.00	7.50	6.50
19	Elsy Fatma Maryanita	7.50	5.50	6.00	8.00	6.50	6.50
20	Melcy Hutmerl	6.00	5.50	7.00	6.50	6.00	8.00
21	Nesa Pramita	6.00	5.00	6.00	7.00	5.50	6.50
22	Yeskel	6.00	6.00	6.50	6.50	6.50	7.50
23	Femas Kristanto	7.00	5.00	7.50	7.50	6.00	8.00
24	Reni	8.00	6.50	7.00	9.00	7.00	7.50
25	Elli Melekh	7.00	5.50	6.00	8.00	7.00	7.50
26	Audrick Hizkia Permana	8.00	6.00	7.00	8.00	6.50	7.00
27	Lusi Lestari	9.00	7.50	5.50	9.00	8.00	7.50
28	Ejos	6.50	4.50	5.50	7.00	6.00	6.00
29	Marselina	7.00	5.50	7.50	7.00	6.50	8.00
30	Berneth Luis Nasario	7.00	5.50	8.00	7.50	6.50	8.00
31	Nictro Enjie Trahanord	7.00	5.50	6.00	7.50	7.00	7.00
32	Mardiyanus Toli	7.00	6.00	7.00	7.00	6.50	8.00
33	Sebastian. A	7.50	6.00	7.00	8.00	7.50	7.50
34	Elesia Berti Riani	7.00	5.00	6.00	7.00	6.50	6.50
35	Beni Desa Putra	9.00	6.50	7.50	9.00	7.50	8.00
36	Feni Nosanti	8.50	7.00	6.00	9.00	8.00	7.50

37	Nadia Decency	9.00	8.50	7.00	9.00	8.50	7.50
38	Rahel	8.00	6.50	7.00	8.50	7.00	7.50
39	Duriyana	7.00	6.00	6.50	7.50	7.00	7.00
40	Elsinta Dela Rosa	7.50	5.50	6.00	8.00	6.50	7.50
41	Ehod Argodi	6.00	5.00	7.00	7.00	6.50	8.00
42	Diggit Bitner. E	6.50	5.00	7.00	7.00	6.50	7.50
43	Jenni Paulinus Aquelela	6.50	5.00	6.00	7.00	6.50	7.00
44	Lis Dahlia	7.00	4.50	5.00	8.50	6.00	7.00
45	Nosariana Masselli	8.00	5.50	7.00	9.00	7.00	7.50

Sumber: *Daftar Nilai SDN 07 Rasau Tahun Ajaran 2012-2013*

Pada table 4.6 menunjukkan nilai rapor dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam meningkat setelah siswa menerima dana BSM.

Temuan ini mengindikasikan bahwa BSM berperan penting dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan prestasi akademik siswa, terutama menyiapkan siswa dalam menghadapi Ujian Nasional. Indikasi tersebut diperkuat oleh pernyataan para guru wali kelas yang sebagian besar meyakini bahwa BSM berkontribusi besar dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini mengindikasikan bahwa BSM tidak hanya mampu meningkatkan prestasi akademik siswa, tetapi juga mendorong siswa untuk lebih siap menghadapi Ujian Nasional. Lebih dari itu, sangat disayangkan apabila para siswa yang cukup pandai tersebut terpaksa harus putus sekolah disebabkan tidak memiliki biaya pendidikan. Pemberian BSM menjadi sangat penting dalam menolong dan berkontribusi agar anak-anak bangsa yang potensial tersebut dapat bertahan dan berprestasi serta memberi peluang untuk menggapai cita-cita masa depan.

#### **4.2. Pengaruh Bantuan Siswa Miskin Terhadap Motivasi Belajar Siswa**

Selain di sekolah, perubahan perilaku belajar siswa juga terjadi di rumah. Artinya pemberian BSM juga berdampak pada motivasi belajar siswa di lingkungan rumah. Temuan ini di dapat saat peneliti melakukan wawancara kepada orang tua dari beberapa murid yang menerima Bantuan Siswa Miskin yang sudah peneliti rangkum pada lampiran TPAM ini. Peningkatan terbesar di nilai oleh orang tua murid terlihat pada kerajinan siswa berangkat ke sekolah, peningkatan minat membaca buku, dan peningkatan aktivitas belajar dirumah.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap kebijakan Kepala Sekolah dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang. Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Kebijakan Kepala Sekolah dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin bekerja sama dengan para guru, Komite Sekolah dan para orang tua murid sudah berjalan dengan baik, walaupun jumlah penerima bantuan tidak sesuai dengan yang diusulkan kepala sekolah. Tetapi hal demikian tidak menjadi penghambat bagi lembaga sekolah untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun, agar mutu pendidikan pada Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang dapat berhasil sesuai yang diharapkan.
- b. Kebijakan Kepala Sekolah yang efektif dan efisien dalam menentukan calon penerima, penetapan penerima bantuan dan mekanisme penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) sudah optimal.
- c. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang bertanggung jawab untuk membantu siswa-siswanya yang tergolong dari keluarga tidak mampu agar memperoleh bantuan.
- d. Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) oleh Kepala Sekolah mendapat pengawasan dari Komite Sekolah dan aparat desa, agar penyaluran bantuan

tidak terjadi penyimpangan, serta tepat sasaran bagi siswa miskin yang layak menerimanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut.

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang perlu meningkatkan sosialisasi dengan sekolah - sekolah yang siswa-siswi nya miskin supaya penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) tersebut tidak mengalami hambatan, karena ketidaktahuan pihak sekolah.
- b. Kinerja Kepala Sekolah perlu terus ditingkatkan untuk memajukan pendidikan terutama pendidikan dasar, diharapkan dengan adanya bantuan tidak ada lagi alasan untuk tidak melanjutkan sekolah.
- c. Program pemerintah dalam memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM) perlu diserahkan untuk siswa yang tidak mampu secara ekonomi dalam melanjutkan sekolah terus berlanjut.
- d. Pengawasan dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) harus terus dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dana Bantuan Siswa Miskin.
- e. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan kuota penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang sesuai dengan jumlah siswa yang berhak menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada setiap sekolah-sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2003). ***Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah*** : Jakarta.

Prasetya Irawan, dkk (2011). ***Metodologi Penelitian Administrasi***, Jakarta : Universitas Terbuka

Bungin, B.H.M (2007). ***Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya***, Jakarta, Kencana.

Moleong L.J (2001). ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Sutopo.H.B (2002). ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Solo : UNS Press.

Napitupulu.P. (2007). ***Pelayanan Publik & Customer Statisfaction. Prinsip-Prinsip Dasar Agar Pelayanan Publik Lebih Berorientasi Pada Kepuasan dan Kepentingan Masyarakat***. Bandung : Alumni.

Purwanto, M.Ng (1997). ***Administrasi dan Supervisi Pendidikan***. Bandung : Rosdakarya.

Sugiyono (2003). ***Metode Penelitian Administrasi***, Bandung : Alfabet

Anwar,P.M (2001). ***Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan***, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mahsum, M.(2006). ***Pengukuran Kinerja Sektor Publik***, Yogyakarta : BPFE.

Wahjosumidjo (2003). ***Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya***. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Handoko, T.H. (1999). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta BPFE.

Gunawan, A.H. (1996). *Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro*. Jakarta : Rineka Cipta

Siswanto, H.B. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Siagian, S.P. (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Mulyono. (2008). *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta : An – Ruzz Media.

Mulyasa, E. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Moenir, H.A.S. (1995). *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta : Bumi Aksara.

Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2003). *Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah* : Jakarta.

Dwiyanto, A.(1995). *Penilaian Kerja Organisasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta : PSKK.UGM.

Miles, B.M & Huberman, A.M.(1992). *Kualitatif Data Analisis*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Departemen Sosial RI (2004). *Petunjuk Pengembangan Usaha Keluarga Binaan Sosial Dalam KUBE*, Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia.

Kismartini, dkk (2012). *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta : Universitas Terbuka.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013), *Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) APBNP*, Jakarta.

Dye, R. Thomas, 1992, *Understanding Publik Policy*, New Jersey : Prentice Hall, Inc.

Darwin, 1994, *Impelentasi Kebijakan*, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan (UGM).



## Transkrip Observasi

Tanggal Observasi : Desember 2014  
Kegiatan : Observasi letak geografis SD Negeri 07 Rasau

Hasil Observasi	:	Dari hasil observasi yang peneliti lakukan didapat bahwa letak SD Negeri 07 Rasau berada di Kecamatan Ketungau Hulu, 139 Km dari Kabupaten Sintang. Tepatnya di desa Rasau Jaya. Desa rasau jaya di kelilingi hutan dan lahan pertanian. Jalan desa sebagian besar masih berupa tanah merah. Akses jalan utama dari Kota Sintang juga masih berupa timbunan tanah merah yang sulit di lewati.
Tanggapan	:	Letak SD Negeri 07 Rasau Jaya masih sulit di akses dari desa lain. Ini menyulitkan Siswa yang berasal dari desa lain untuk berangkat ke sekolah.



### Transkrip Observasi

Tanggal Observasi : Desember 2014  
 Kegiatan : Observasi Keadaan Sekolah Dasar Negeri 07 Rasau Jaya

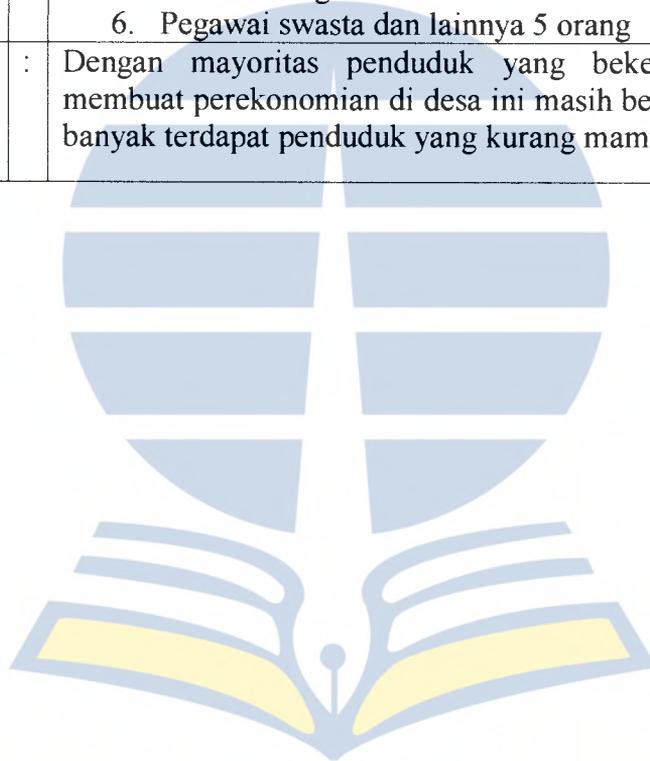
<p>Hasil Observasi</p>	<p>: Dari hasil observasi yang peneliti lakukan didapat bahwa Sekolah Dasar Negeri 07 Rasau Jaya memiliki luas tanah 18750 m<sup>2</sup> dengan panjang tanah 100 m' dan lebar 187.5 m'. SD Negeri 07 Rasau Jaya memiliki 6 ruang belajardan 1 ruang kerja guru (kantor). Selain itu terdapat 1 rumah dinas kepala sekolah dan 2 rumah dinas guru.</p> <p>Sekolah Dasar Negeri 07 Rasau Jaya memiliki 10 orang tenaga pendidik yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 2 orang guru umum PNS, 1 orang guru agama PNS, 2 orang guru kontrak Daerah, serta 3 orang guru honor Sekolah dan 1 (satu) orang penjaga sekolah PNS. Dengan Jumlah siswa di Sekolah Dasar 07 Rasau Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang berjumlah 156 orang yang terdiri dari 70 orang laki-laki dan 86 orang perempuan.</p>
<p>Tanggapan</p>	<p>: SD Negeri 07 rasau masih minim fasilitas untuk belajar mengajar. Selain itu tenaga pendidik juga masih minim.</p>



### Transkrip Observasi

Tanggal Observasi : Desember 2014  
 Kegiatan : Observasi Keadaan Penduduk Di Daerah Rasau Jaya  
 Kecamatan Ketungau Hulu

<p>Hasil Observasi</p>	<p>: Dari hasil observasi dan wawancara dengan kepala desa yang peneliti lakukan didapat data bahwa di desa Rasau Jaya Kecamatan Ketungau Hulu terdapat 98 Kepala Keluarga dengan total 600 Jiwa pada tahun 2013. Sebagian besar kepala keluarga bekerja sebagai petani.</p> <p>Rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petani 68 orang</li> <li>2. Pedagang 15 orang</li> <li>3. Pegawai Negeri Sipil 8 orang</li> <li>4. TNI 1 orang</li> <li>5. Polri 1 orang</li> <li>6. Pegawai swasta dan lainnya 5 orang</li> </ol>
<p>Tanggapan</p>	<p>: Dengan mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani membuat perekonomian di desa ini masih belum baik, dan masih banyak terdapat penduduk yang kurang mampu.</p>



## Transkrip Wawancara

Pertanyaan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang  
dan Kepala Sekolah

Nama Informan	: Drs, Marcues Afen, M.Si
Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang
Nama Informan	: Jailani S.Pd.SD
Jabatan	: Kepala Sekolah SDN 07 Rasau Jaya
Kegiatan	: Wawancara mengenai Penentuan Calon Penerimaan Bantuan Siswa Miskin dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Siswa Miskin.

### PERTANYAAN

#### A. Efektivitas dan efisiensi penentuan calon siswa penerima Bantuan Siswa Miskin.

##### 1. Penetapan kriteria calon siswa penerima Bantuan Siswa Miskin

##### a. Kriteria apa saja yang harus dipenuhi siswa supaya memperoleh bantuan?

Jawab :

- 1) Siswa yang orang tuanya kurang mampu atau mempunyai penghasilan kurang dari Rp. 500.000 perbulan.
- 2) Siswa yang masih aktif sekolah dan berkelakuan baik
- 3) Berkeinginan untuk sekolah
- 4) Terancam putus sekolah karena kekurangan biaya
- 5) Tidak mempunyai tempat tinggal yang layak
- 6) Siswa yang tidak menerima bantuan dari sumber lain

##### b. Bagaimana proses pendataan untuk menentukan calon penerima bantuan?

Jawab :

- 1) Melakukan wawancara dengan siswa miskin
- 2) Langsung kelapangan mengunjungi para keluarga dari siswa miskin dari para siswa miskin.
- 3) Mencari keterangan kepada masyarakat dan komite sekolah.
- 4) Bermusyawarah dengan dewan guru untuk menyeleksi siswa yang memang layak untuk mendapatkan bantuan.

c. Berapa jumlah calon siswa penerima bantuan ?

Jawab :

- 1) Dinas Pendidikan sudah menetapkan kuota siswa penerima bantuan dengan pertimbangan supaya semua sekolah mendapat hak yang sama untuk memperoleh bantuan.
- 2) Calon penerima bantuan yang diusulkan berdasarkan kuota yang ditetapkan adalah sebanyak 45 orang.
- 3) Dengan adanya keterbatasan jumlah penerima pihak sekolah melakukan seleksi bagi siswa miskin yang benar-benar layak untuk mendapatkan Bantuan Siswa Miskin.

2. Efektivitas dan efisiensi penetapan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin.

a. Bagaimana proses pelaporan siswa miskin ?

Jawab :

- 1) Setelah pendataan dilakukan dan siswa yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan sudah memenuhi persyaratan, maka pihak sekolah melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
  - 2) Pengusulan atau pelaporan harus segera dilakukan untuk mempercepat proses administrasi sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dengan segera mengajukan calon siswa penerima bantuan kepada Kementerian Pendidikan Nasional.
- b. Siapakah yang menetapkan siswa penerima bantuan ?

Jawab :

- 1) Setelah pengusulan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dan persyaratan bagi calon siswa penerima bantuan sudah lengkap, maka hanya menunggu proses penerbitan SK penetapan siswa penerima bantuan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
  - 2) SK Penetapan siswa penerima bantuan dikirim ke sekolah-sekolah penerima bantuan, Bantuan Siswa Miskin (BSM).
- c. Bagaimana mengetahui bahwa siswa yang sudah diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan ?

Jawab :

- 1) Informasi siswa penerima bantuan diketahui dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang melalui pemberitahuan kepada

semua sekolah ataupun ditempel dipapan pengumuman di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

- 2) Setelah ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, pihak sekolah mengumumkan kepada siswa secara langsung nama siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan ataupun nama-nama siswa penerima bantuan ditempel dipapan pengumuman yang ada di sekolah.

### 3. Mekanisme penyaluran Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau.

- a. Bagaimana proses pengambilan dana bantuan ?

Jawab :

- 1) Dana bantuan dapat diambil sendiri oleh siswa dengan membawa persyaratan yang harus dipenuhi.
- 2) Pemberian kuasa kepada kepala sekolah untuk mencairkan dana bantuan dengan berbagai pertimbangan tempat yang sangat jauh terpencil sehingga tidak memungkinkan untuk para siswa atau pun orang tua untuk mengambil dana bantuan karena dana bantuan yang diterima akan habis untuk ongkos di jalan.
- 3) Pemberian kuasa kepada kepala sekolah dilakukan untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, serta karena ketidaktahuan orang tua siswa miskin untuk mengurus berbagai administrasi yang harus dipenuhi.

- b. Dimana tempat pengambilan dana bantuan ?

Jawab :

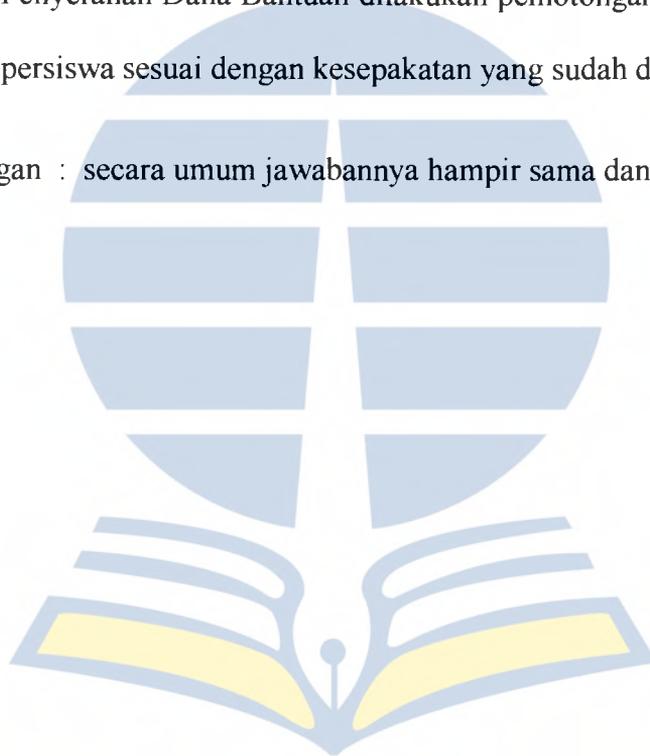
1) Tempat pencairan dana bantuan bagi siswa miskin dipercayakan di PT. Bank Kalbar.

c. Bagaimana prosedur pembagian dana bantuan ?

Jawab :

- 1) Setelah dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) diterima di kantor Bank Kalbar, kepala sekolah mengundang para orang tua siswa miskin, Komite dan aparat desa untuk melakukan penyaluran Bantuan Siswa Miskin.
- 2) Dana bantuan langsung diserahkan kepada para orang tua siswa miskin yang disaksikan oleh Komite Sekolah dan Aparat Desa.
- 3) Penyerahan Dana Bantuan dilakukan pemotongan sebesar Rp. 35.000 persiswa sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.

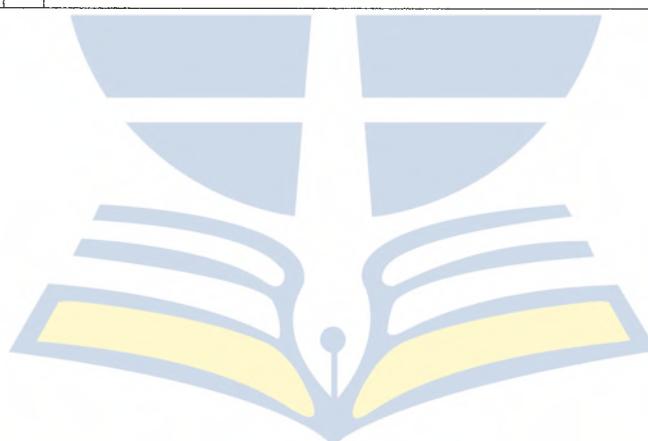
Keterangan : secara umum jawabannya hampir sama dan dirangkum jadi satu



### Transkrip Wawancara

Nama Informan : Jailani S.Pd.SD  
 Jabatan : Kepala Sekolah SDN 07 Rasau Jaya  
 Kegiatan : Wawancara mengenai pengaruh Bantuan Siswa Miskin terhadap belajar anak

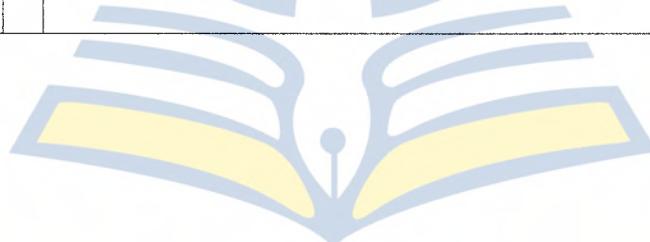
Peneliti	:	Apakah anak murid mengalami peningkatan di bidang akademik setelah mendapatkan Bantuan Siswa Miskin ?
Informan	:	Dari daftar nilai rapor murid tahun 2013 ini saya melihat anak-anak murid yang mendapatkan bantuan mengalami peningkatan dalam beberapa mata pelajaran di bandingkan tahun lalu. Terutama mata pelajaran yang akan menjadi standar Ujian Nasional.
Peneliti	:	Apa harapan bapak selanjutnya dari program Bantuan Siswa Miskin ini ?
Informan	:	Saya berharap bantuan siswa miskin ini terus ada, karena ini sangat berpengaruh bagi orang tua murid yang tidak mampu. Dan saya merasa bantuan seperti ini dapat memotivasi murid-murid yang tidak mampu untuk terus bersekolah.
Kesimpulan	:	Dari hasil wawancara yang peneliti rangkum. Peneliti menyimpulkan bahwa Bantuan Siswa Miskin ini sangat membantu dan memberikan dampak positif bagi murid-murid di Sekolah Dasar Negeri 7 Rasau.



### Transkrip Wawancara

Nama Informan : Sawabi  
 Jabatan : Guru  
 Kegiatan : Wawancara mengenai pengaruh Bantuan Siswa Miskin terhadap belajar anak

Peneliti	:	Apakah anak-anak murid yang mendapatkan bantuan memiliki peningkatan dalam semangat belajar di sekolah ?
Informan	:	Ya, tentu saja pak. Saya merasakan adanya peningkatan semangat belajar dari murid murid yang mendapatkan bantuan. Di bidang akademik mereka mengalami peningkatan nilai rapor, absensi juga mengalami peningkatan yang baik. Dari data nilai para guru saya melihat selain lebih semangat ke sekolah tampaknya murid murid juga menyerap pelajaran dengan baik. Saya menilai para murid di sekolah ini selain mendapat bantuan secara materi mereka juga di bimbing morilnya oleh para guru agar tertanam rasa ingin belajar dan sekolah yang tinggi.
Peneliti	:	Apa harapan bapak selanjutnya dari program Bantuan Siswa Miskin ini ?
Informan	:	Saya mengharapkan bantuan ini terus di berikan kepada anak murid yang tidak mampu. Selain mereka terbantu secara materi, kami para guru disini juga terbantu dalam proses belajar mengajar jika anak murid kami semangat untuk sekolah dan mengikuti proses belajar dengan baik.
Kesimpulan	:	Dari hasil wawancara yang peneliti rangkum. Peneliti menyimpulkan bahwa Bantuan Siswa Miskin ini sangat berpengaruh baik terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah.



### Transkrip Wawancara

Nama Informan : Salmon  
 Jabatan : Orang Tua Murid  
 Kegiatan : Wawancara mengenai pengaruh Bantuan Siswa Miskin terhadap belajar anak

Peneliti	:	Bagaimana pendapat bapak tentang Bantuan Siswa Miskin yang diberikan pihak sekolah ?
Informan	:	Terima kasih sebelumnya kepada pihak sekolah SDN 07 Rasau, menurut saya pribadi program bantuan siswa miskin ini sangat membantu saya, terutama anak. Dengan adanya bantuan ini anak saya dapat mengenakan seragam sekolah yang layak, perlengkapan sekolahnya juga terpenuhi. Pokoknya sangat membantu lah.
Peneliti	:	Apakah ada peningkatan belajar anak di rumah setelah mendapatkan bantuan dari sekolah ?
Informan	:	Ada, terutama dalam mengerjakan PR lah. Belajarnya juga saya lihat makin semangat, pergi ke sekolahnya juga semangat. Karena dapat sepatu baru mungkin ya hehe
Peneliti	:	Apa harapan bapak selanjutnya dari program Bantuan Siswa Miskin ini ?
Informan	:	Harapan saya semoga bantuan bantuan seperti ini akan terus ada, terutama untuk keluarga yang ekonominya seperti kami ini, Sangat membutuhkan sekali bantuan seperti ini. Setidaknya anak-anak dapat terus sekolah dan mewujudkan cita-citanya. Semua orang tua pasti mengharapkan anaknya bias sekolah setinggi mungkin.
Kesimpulan	:	Dari hasil wawancara yang peneliti rangkum. Peneliti menyimpulkan bahwa Bantuan Siswa Miskin ini sangat berpengaruh kepada keluarga yang tidak mampu, terutama dalam membeli perlengkapan sekolah seperti seragam,sepatu dan alat tulis. Selain itu Bantuan Siswa Miskin juga dapat meningkatkan motivasi anak untuk lebih giat belajar dan sekolah.

### Transkrip Wawancara

Nama Informan : Gunda  
 Jabatan : Orang Tua Murid  
 Kegiatan : Wawancara mengenai pengaruh Bantuan Siswa Miskin terhadap belajar anak

Peneliti	:	Bagaimana pendapat bapak tentang Bantuan Siswa Miskin yang diberikan pihak sekolah ?
Informan	:	Saya secara pribadi sangat terbantu dengan di berikannya bantuan ini. Saya bisa membelikan anak saya buku baru, pakaian sekolah baru. Anak pun menjadi lebih rajin sekolahnya, jadi lebih semangat pak.
Peneliti	:	Apakah ada peningkatan belajar anak di rumah setelah mendapatkan bantuan dari sekolah ?
Informan	:	Tentu ada pak, anak saya itu kalau sudah pulang sekolah selesai makan kadang langsung ngerjain PR. Kalo malam suka belajar, baca baca buku.
Peneliti	:	Apa harapan bapak selanjutnya dari program Bantuan Siswa Miskin ini ?
Informan	:	Harapan saya semoga pemerintah dapat memberikan terus bantuan seperti ini dan memperhatikan sekkolah-sekolah disini. Banyak anak-anak yang ingin sekali sekolah tinggi tapi terhambat biaya. Terutama untuk membeli perlengkapan sekolah. Kadang anak-anak itu kan pengennya sepatu yang layak, baju, tas. Syukurlah masih ada bantuan seperti ini, setidaknya meringankan kami dan yang terpenting anak-anak semangat sekolahnya.
Kesimpulan	:	Dari hasil wawancara yang peneliti rangkum. Peneliti menyimpulkan bahwa Bantuan Siswa Miskin ini sangat berpengaruh kepada keluarga yang tidak mampu, terutama dalam membeli perlengkapan sekolah seperti seragam,sepatu dan alat tulis.  Selain itu Bantuan Siswa Miskin juga dapat meningkatkan motivasi anak untuk lebih giat belajar dan sekolah.

### Kuisisioner

Pertanyaan kepada dewan guru, komite dan orang tua siswa

1. Sawabi : Dewan Guru
2. Eduin,S.Pd.SD : Dewan Guru
3. Ludangi,S.Th : Dewan Guru
4. Kawing : Ketua Komite
5. Salmon : Orang Tua Siswa
6. Gunda : Orang Tua Siswa
7. Cucim : Orang Tua Siswa

### PERTANYAAN

#### A. Efektivitas dan efisiensi kebijakan Kepala Sekolah dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau.

1. Efektivitas dan efisiensi penentuan calon penerima bantuan siswa miskin
  - a. Bagaimana proses seleksi penentuan calon penerima bantuan siswa miskin

Jawab :

- 1) Kepala Sekolah mendata siswa miskin yang ada di sekolah
- 2) Untuk mengetahui kondisi siswa miskin yang sebenarnya kepada sekolah langsung kelapangan atau kerumah siswa miskin
- 3) Mengajukan pertanyaan tentang penghasilan orang tua.
- 4) Penentuan calon penerima sepenuhnya adalah hak sekolah

5) Untuk menghemat waktu, biaya dan tenaga penentuan calon penerima dilakukan oleh pihak sekolah.

b. Berapa jumlah calon siswa penerima bantuan

Jawab :

1) Berdasarkan edaran / pengumuman yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang bahwa jumlah yang ditentukan sebanyak 45 orang.

2) Penetapan jumlah berdasarkan pembagian dana yang diterima agar semua sekolah dasar di Kabupaten Sintang mendapatkan bantuan.

3) Penentuan jumlah calon penerima untuk menghindari terjadinya penumpukan di satu sekolah.

c. Bagaimana tingkat pengertian para orang tua terhadap penentuan calon penerima

Jawab :

1) Para orang tua sangat memahami bahwa bantuan yang diberikan untuk membantu para siswa miskin agar tidak berhenti sekolah.

2) Harapan semoga bantuan yang diberikan akan terus berlanjut.

3) Diharapkan jumlah siswa penerima dapat ditambah lebih banyak lagi.

2. Efektivitas dan efisiensi penetapan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin.

a. Bagaimana proses penetapan siswa penerima bantuan ?

Jawab :

- 1) Penetapan siswa penerima bantuan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui usulan dari pihak sekolah.
  - 2) Para siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan dilakukan melalui rapat sekolah.
  - 3) Siswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan harus memenuhi kriteria didalam buku petunjuk pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari Kementerian Pendidikan Nasional.
- b. Bagaimana caranya mengetahui bahwa siswa miskin ditetapkan sebagai penerima bantuan ?

Jawab :

- 1) Setelah pendataan dilakukan oleh kepala sekolah selanjutnya dilakukan rapat disekolah untuk menyeleksi siswa miskin yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan.
  - 2) Pemberitahuan siswa penerima bantuan ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten disampaikan surat pemberitahuan kepada sekolah – sekolah maupun be pengumuman melalui Radio.
  - 3) Pemberitahuan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten untuk selanjutnya pihak sekolahlah mengumumkan ama-nama siswa miskin yang mendapatkan bantuan.
3. Mekanisme penyaluran Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar 07 Rasau.
- a. Mengapa perlu dilakukan pengawasan ?

Jawab :

- 1) Pengawasan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap penyaluran bantuan.
- 2) Para guru dan orang tua turut serta mengawasi penyaluran bantuan, agar bantuan yang diterima sesuai dengan besarnya bantuan yang diberikan.
- 3) Pengawasan sangat perlu dilakukan supaya penyaluran bantuan dapat berjalan dengan tertib aman dan lancar.

b. Bagaimana caranya pengambilan dana bantuan ?

Jawab :

- 1) Para orang tua siswa memberikan kuasa kepada kepala sekolah untuk mencairkan dana bantuan.
- 2) Pemberian kuasa kepada kepala sekolah untuk menghemat biaya dalam pencairan bantuan siswa miskin pada Bank KalBar yang a Sintang.
- 3) Pemberian kuasa kepada kepala sekolah untuk mempermudah pengurusan administrasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang maupun pada Bank KalBar.
- 4) Karena letak yang jauh yang tidak memungkinkan setiap siswa untuk mengambil sendiri dana bantuan, maka dikuasakan kepada kepala sekolah.

c. Bagaimana prosedur penyaluran bantuan ?

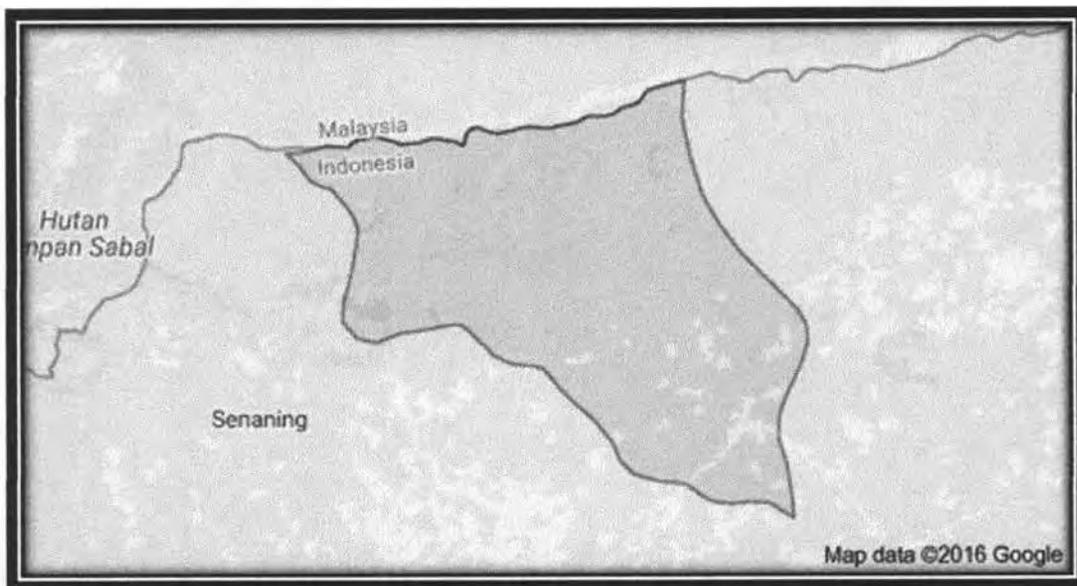
Jawab :

- 1) Penyaluran bantuan diambil pada Bank KalBar yang ada di Sintang, selanjutnya pihak sekolah menyalurkan langsung kepada para siswa agar dapat dipergunakan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan biaya sekolah.
- 2) Para orang tua siswa diundang ke sekolah untuk menerima dana bantuan yang sudah dicairkan oleh kepala sekolah.

Keterangan : secara umum jawabannya hampir sama dan dirangkum jadi satu

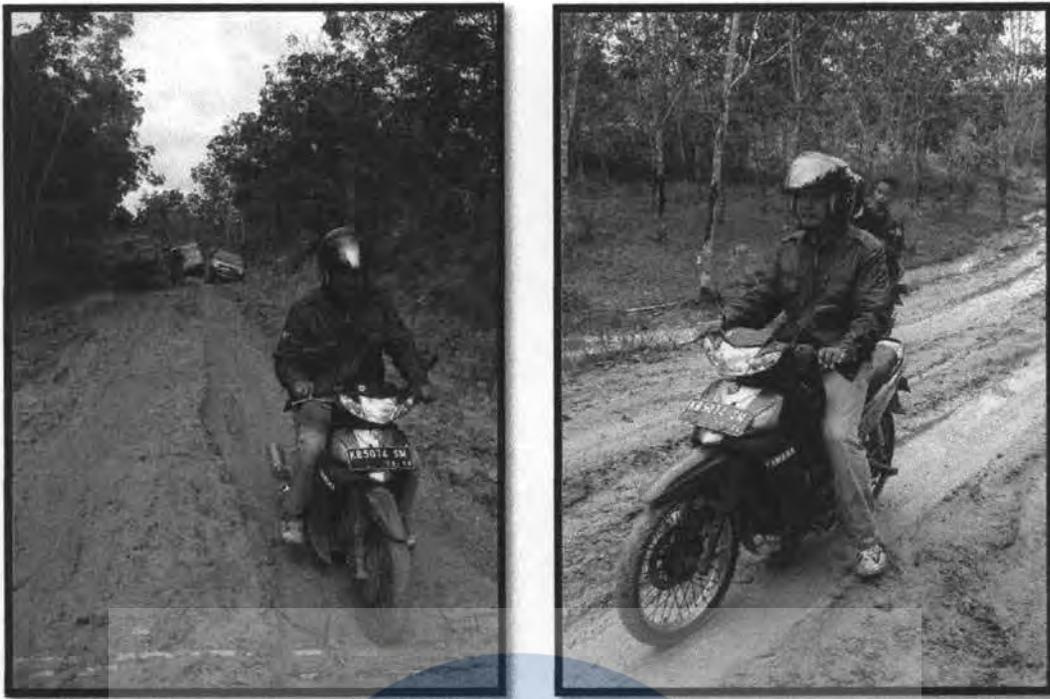


### Peta Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu



Peta Wilayah Kecamatan Ketungau Hulu | Sumber : GoogleMap



**DOKUMENTASI**

*Jalan Akses Dari Kab. Sintang Menuju Kecamatan Ketungau Hulu*





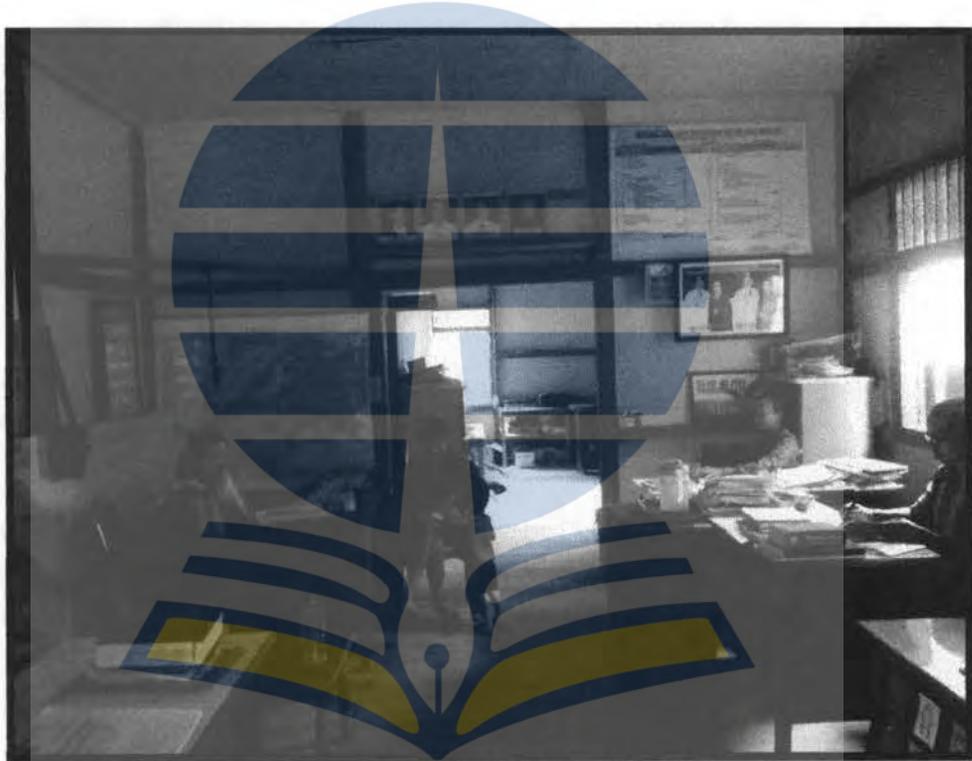
*Sekolah Dasar Negeri 7 Rasau*



*Sekolah Dasar Negeri 7 Rasau*



*Sekolah Dasar Negeri 7 Rasau*



*Ruang Guru Sekolah Dasar Negeri 7 Rasau*



*Ruang Guru Sekolah Dasar Negeri 7 Rasau*



*Pertemuan Para Dewan Guru dan Komite Dengan Para Orang Tua Murid  
Membahas Bantuan Siswa Miskin Di Ruang Kelas*



*Pertemuan Para Dewan Guru dan Komite Dengan Para Orang Tua Murid Saat Membahas Bantuan Siswa Miskin Di Ruang Kelas*

